

No. 146 Maret - April 2018

BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

www.bakti.org



**KONDISI DUNIA PENELITIAN
DI INDONESIA**

**2017: TAHUN ADVOKASI
PROGRAM MAMPU-BaKTI**

**BENARKAH TEKNOLOGI
RUANG UNTUK LAKI-LAKI?**

**BANGGA PAPUA:
MENYUSUN STRAKOM
LEWAT ASSESSMENT**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Editor **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
VICTORIA NGANTUNG
ITA MASITA IBNU

Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**

Database
Kontak **INDINA ISBACH**

Design & layout
Editor Foto **FRANS GOSALI**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News** Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTI News

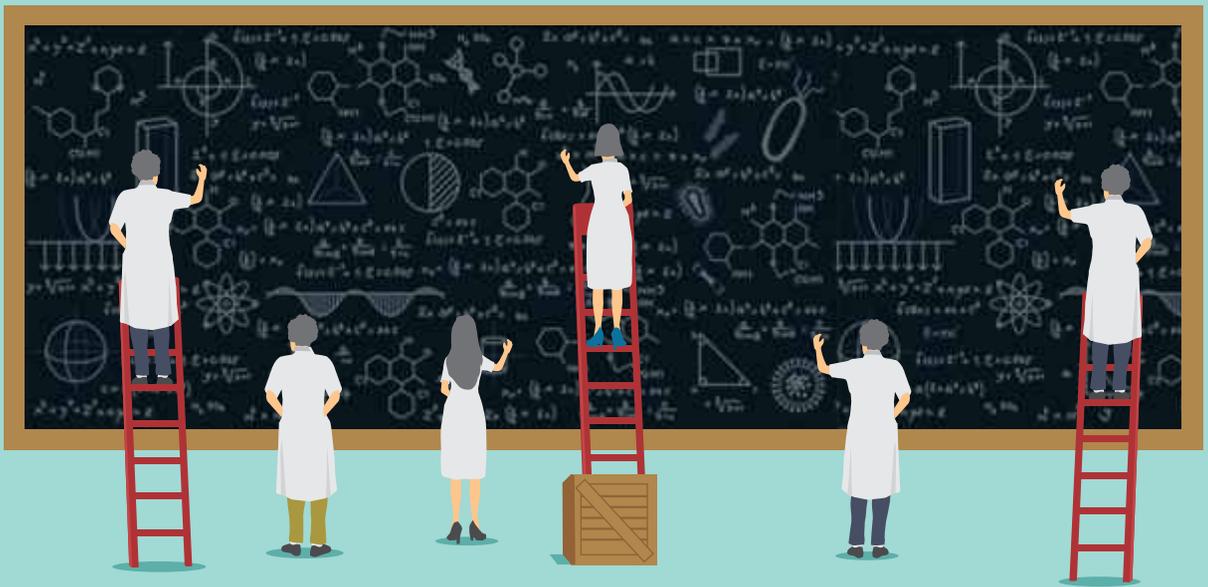
Maret - April 2018

No. 146

-
- 1** Kondisi Dunia Penelitian di Indonesia
Oleh **SCHOLASTICA GERINTYA**
- 5** Perempuan Papua, Deforestasi dan Kekerasan
Oleh **ANDRE BARAHAMIN**
- 9** Kajian Tipologi Kemiskinan (Bagian 2)
Oleh **AGUSSALIM**
- 13** Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Melalui Manajemen Berbasis Sekolah
Oleh **N. J. TANGKEPAYUNG**
- 15** Sinergi Untuk Memperkuat Komitmen Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Jayapura
Oleh **N. J. TANGKEPAYUNG**
- 17** Benarkah Teknologi Ruang untuk Laki-laki?
Oleh **ANDI MISBAHUL PRATIWI**
- 21** 2017: Tahun Advokasi Program MAMPU-BaKTI
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 25** Menjemput Harapan di Bastem Utara
Oleh **M. YUSUF WEANDARA**
- 29** Lakukan Sesuatu untuk Menghentikan Gaya Menulis Cabul
Oleh **MUGNIAR MARAKARMA**
- 33** BANGGA Papua: Menyusun Strakom Lewat Assessment
- 37** Melestarikan Hutan Alam di Gorontalo dengan Restorasi Ekosistem
- 39** Kegiatan di BaKTI
- 41** Info Buku

Foto Cover : Stevent Febriandy/Yayasan BaKTI





Ilustrasi : Frans Gosali (Repro)

KONDISI DUNIA PENELITIAN DI INDONESIA

Oleh **SCHOLASTICA GERINTYA**

Indonesia menempati **peringkat 45** untuk jumlah dokumen yang terpublikasi internasional.

Gross Domestic Expenditure on Research and Development (GERD) per PDB Indonesia hanya **0,085** persen, jauh tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Riset di Indonesia masih tertinggal, tapi seberapa tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya ?



Riset sangat penting dalam perkembangan kehidupan dan peradaban. Melalui riset, berbagai pengetahuan baru bermunculan, rentetan teknologi baru terus

dikembangkan. Berbagai kendala dan persoalan yang dihadapi umat manusia amat mungkin ditemukan jawabannya melalui riset.

Bagaimana Kondisi Dunia Penelitian di Indonesia ?

Berdasarkan data SCImago, sepanjang 1996-2016, jumlah publikasi terindeks global Indonesia mencapai 54.146 publikasi. Bila dibandingkan Singapura, Thailand, dan Malaysia, peringkat Indonesia masih jauh berada di bawah ketiga negara ASEAN itu. Pada 2016, di tingkat dunia, Indonesia menempati peringkat 45 untuk jumlah dokumen yang terpublikasi internasional. Di kawasan Asia, posisi Indonesia berada di urutan 11, sementara di tingkat ASEAN peringkat keempat.

Selain itu, tren jumlah dokumen publikasi di Singapura, Thailand, Malaysia, dan Indonesia terus meningkat. Mulai 2010, Malaysia menggeser posisi Singapura ke peringkat kedua. Terkait dokumen yang terpublikasi di Indonesia, jumlahnya meningkat menjadi 46,41 persen (11.470 publikasi) jika dibandingkan 7.834 publikasi pada 2015. Kendati naik, angka ini masih jauh bila dibandingkan Singapura (19.992 publikasi) dan Malaysia (28.546 publikasi).

Menariknya, jumlah citation atau kutipan mengalami tren penurunan sejak 2013. Selain itu, meski Malaysia berada di peringkat pertama dalam jumlah dokumen yang terpublikasi, tetapi bila dilihat dari jumlah citation, Malaysia berada di peringkat kedua (19.024 kutipan) setelah Singapura (32.504 kutipan) pada 2016. Thailand berada di peringkat ketiga (11.331 kutipan) dan Indonesia keempat (4.604 kutipan).

Selain publikasi, cara lain untuk melihat posisi dan kontribusi riset adalah jumlah paten yang dihasilkan. Bersumber dari United States Patent and Trademark Office, hingga 2015, total paten Indonesia yang terdaftar pada Kantor

Publikasi Internasional Indonesia dan Beberapa Negara ASEAN

tirtod



Sumber : SCImago

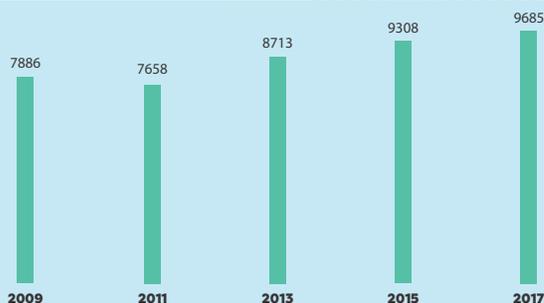
Perbandingan Jumlah Paten In dengan Beberapa Negara ASEAN



Sumber : UPSTO

Jumlah Peneliti di Indonesia

tirtod



Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Rasio Pengeluaran Penelitian Pengembangan Terhadap PD



Sumber : UIS Data Ce

Keterangan: Jumlah peneliti di seluruh pejabat fungsional peneliti dari seluruh Kementerian/LPNK di Indonesia

Paten Amerika berjumlah 333. Angka ini masih sangat jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (10.044 paten), Malaysia (2.690 paten), dan Thailand (1.043 paten). Tidak hanya tertinggal, pertumbuhan paten Indonesia juga menunjukkan tren yang stagnan sejak 2005.

Rendahnya jumlah dokumen yang terpublikasi secara internasional, salah satunya, disebabkan sedikitnya jumlah peneliti di Indonesia. Data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2017 menunjukkan peneliti di Indonesia (hanya) berjumlah 9.685 orang. Angka tersebut merupakan jumlah peneliti di seluruh pejabat fungsional peneliti dari seluruh Kementerian/Lembaga

Pemerintah NonKementerian (LPNK) di Indonesia.

Memang ada tren kenaikan kuantitas sejak 2010. Pada 2010 jumlah peneliti di Indonesia mencapai 7.502 orang, pada 2012 berjumlah 8.075 orang. Angka terus meningkat menjadi 9.128 orang pada 2014.

Meski jumlahnya terus bertambah, jumlah ini masih terbilang sedikit dibandingkan negara di kawasan ASEAN. Sebab, rasio jumlah peneliti dengan jumlah penduduk di Indonesia adalah 90 peneliti berbanding 1 juta penduduk. Misalnya saja, rasio jumlah peneliti dengan jumlah penduduk di Singapura adalah lebih dari 7000 ribu peneliti per satu juta penduduk. Sedangkan Malaysia sebanyak 2.590 peneliti



per satu juta penduduk. Sementara di Indonesia, rasionya sebesar 1.071 peneliti per satu juta penduduk.

Faktor penting lainnya adalah anggaran riset. Negara-negara dengan perekonomian maju memiliki komitmen tinggi untuk berinvestasi dalam riset. Mereka percaya riset berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bentuk komitmen ini dilihat dari rasio pengeluaran penelitian dan pengembangan terhadap PDB –atau *Gross Expenditure on Research and Development*(GERD).

Negara-negara dengan komitmen yang tinggi terhadap riset, berdasarkan data 2013, adalah Korea Selatan (4,1 persen), Jepang (3,5 persen), dan Finlandia (3,3 persen). Di tingkat ASEAN,

yang memiliki rata-rata GERD per PDB tinggi adalah Singapura (2,0 persen) dan Malaysia (1,1 persen). Sementara itu, GERD per PDB Indonesia belum mencapai angka 1 persen –hanya sebesar 0,085 persen– dan jauh tertinggal dibandingkan GERD dunia.

Di satu sisi, komposisi belanja penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia pun masih didominasi pemerintah. Dengan kata lain, perlu dorongan agar proporsi sektor swasta atau bisnis dalam penelitian dan pengembangan dapat meningkat.

Anggaran yang kecil, rendahnya jumlah peneliti, dan sedikitnya publikasi ilmiah juga berdampak pada rendahnya daya saing universitas-universitas Indonesia di tingkat dunia. Mengacu daftar yang dibuat Times Higher Education, dua universitas Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI), berada di peringkat lebih dari 800. Di Asia, ITB menempati urutan 201-250 dan UI lebih dari 251. Sementara itu, merujuk pada data QS Ranking, peringkat UI di dunia adalah 325 dan ITB adalah 401-410. Dari data yang sama, di tingkat Asia, UI menempati urutan ke 67 dan ITB ke 86.

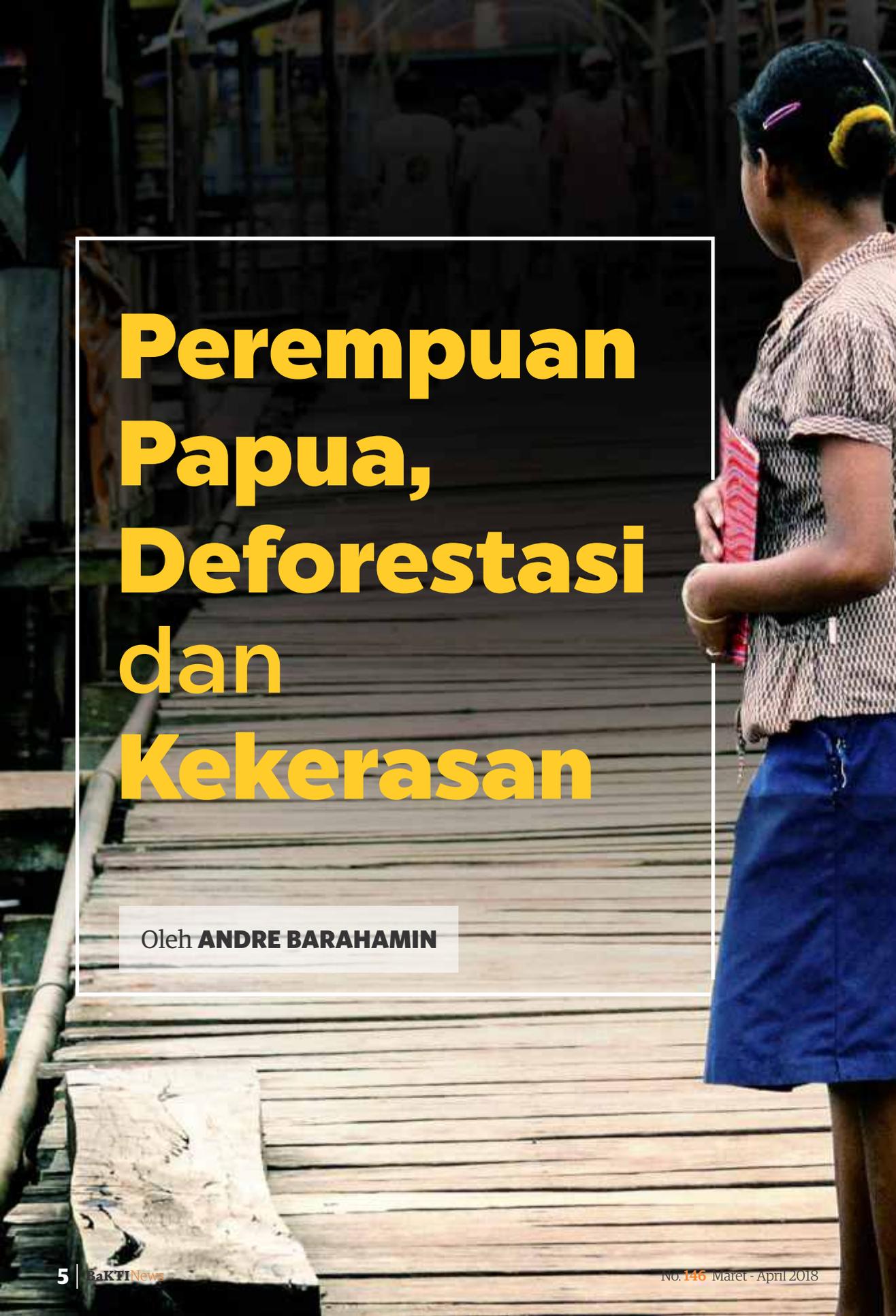
Tampak korelasi positif antara jumlah publikasi ilmiah, besaran anggaran, dan jumlah peneliti dengan peringkat universitas. Universitas dengan negara-negara yang berkomitmen tinggi dalam hal riset masuk dalam peringkat 50 besar dunia. Misalnya saja Singapura. Berdasarkan daftar QS tingkat dunia, National University of Singapore menempati urutan 12 dan Nanyang Technological University ke 13. Sementara di Asia, National University of Singapore menempati posisi pertama dan Nanyang Technological University peringkat ke 3.

Paparan data di atas menunjukkan dunia riset Indonesia masih harus banyak dibenahi. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga keterlibatan sektor swasta. Peningkatan anggaran menjadi hal penting untuk meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi ilmiah. Selain itu, belum nyambungunya hasil riset dengan kebutuhan industri juga menjadi persoalan yang memerlukan solusi.

Hal lain adalah pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang belum optimal, seperti anggaran, fasilitas riset, dan peneliti. Semua hal ini perlu dibarengi dengan meningkatkan budaya dan literasi ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia.●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tulisan ini bersumber dari laman tirto.id dan dapat dibaca pada tautan www.tirto.id/kondisi-dunia-penelitian-di-indonesia-cvuj.
Reporter: **Scholastica Gerintya**



Perempuan Papua, Deforestasi dan Kekerasan

Oleh **ANDRE BARAHAMIN**



Foto : Dokl Yayasan BaKTI



Kami berharap, pelatihan seperti ini tidak berhenti”. Yuliana Akubar, salah satu tokoh perempuan dari Sub-suku Sarakwari, membaca lantang kertas

ekspektasi yang ada di tangannya. “Dapat terus dilanjutkan di masa depan”. Ia tidak sendiri. Meski struktur kalimatnya berbeda, namun narasi inti mereka serupa. Berharap bahwa ini baru saja memulai.

Mungkin harapan mereka sudah melaju lebih dulu ke masa depan. “Baru kali ini, kami mama-mama tidak cuma berada di dapur untuk menyiapkan konsumsi. Kali ini tugas bapa-bapa. Ini giliran mama-mama untuk pake baju bagus dan ikut kegiatan. Semua konsumsi rasanya tidak hancur”, kata Fitria Yoweni kepada saya sembari tertawa.

Perempuan ini sejak awal adalah salah satu yang paling aktif terlibat dalam berbagai ragam pertemuan Suku Besar Yerisiam. Ia berkali-kali memainkan peran penting sebagai koordinator konsumsi. “Tidak apa-apa kalau anak-anak ikut juga kan?” ia bertanya. Saya mengangguk.

Di atas balai adat yang berbentuk rumah panggung, ada sekitar 12 balita yang menggelayut di pangkuan ibu mereka. Beberapa lagi yang berumur antara enam hingga delapan tahun tampak hilir mudik dan sesekali mengambil alat peraga. Mereka menjadi peserta tambahan yang sudah diprediksi sejak awal. Suasana ramai sekali.

Siang itu, Jumat, 10 November 2017, adalah hari pertama dari dua hari rangkaian lokalatih

yang diprakarsai Yayasan PUSAKA bekerja sama dengan Suku Besar Yerisiam Gua. Pelatihan tersebut direncanakan berlangsung selama dua hari di Balai Pertemuan Adat, Suku Besar Yerisiam Gua di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire. Senin, 13 November nanti, pertemuan akan dilanjutkan lagi. Pendeta Magdalena Kafiari, dari KPKC GKI Papua, bertindak sebagai fasilitator di hari pertama. Ia memandu para perempuan Yerisiam untuk mendapatkan pemahaman dasar mengenai peran dan hak-hak perempuan di dalam keluarga, di dalam suku dan sebagai warga kampung.

Ini adalah kegiatan pertama yang secara spesifik menasar perempuan dari Suku Besar Yerisiam Gua sebagai kelompok penerima manfaat. Tidak heran, animo para perempuan untuk ikut serta begitu tinggi. Ditargetkan melibatkan sekitar 25 orang perempuan, kegiatan ini diikuti oleh 30 orang perempuan di hari pertama dan bertambah 3 orang lagi di hari berikutnya. Mereka mewakili empat sub-suku di dalam Suku Besar Yerisiam Gua.

Yerisiam Gua adalah salah satu contoh bagaimana kehadiran program pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam berskala besar di tanah Papua, telah menimbulkan beragam masalah sosial budaya, ekonomi, hukum dan lingkungan. Kedatangan perusahaan perkebunan kelapa sawit mengubah drastis corak produksi dan relasi sosial budaya di masyarakat.

“Kami dulu tidak perlu jalan jauh masuk hutan untuk ambil daun pandan. Ada banyak di dekat kampung. Tapi sekarang, karena hutan sudah habis ditebang untuk kelapa sawit, mau buat tikar saja susah. Harus jalan jauh”. Dorkas Numberi memamerkan daun pandan hutan yang sudah dikeringkan. Berukuran selebar jari tangan yang dibariskan rapat. Nantinya, daun pandan hutan kering ini akan diiris menurut ukuran yang diinginkan sebelum dianyam menjadi tikar atau ragam kerajinan lain.

Masyarakat adat Papua (laki-laki dan perempuan) yang sebelumnya hidup sangat bergantung pada sumber daya alam dengan pengelolaan berdasarkan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat setempat, terpaksa atau dipaksa berubah. Mereka akan tergilas jika

enggannya mengikuti pengetahuan dan budaya ekonomi baru, sistem kerja dan tata organisasi modern yang dikendalikan pemilik modal dan berdasarkan hukum-hukum negara.

“Nanti bisa jadi tikar, bisa jadi noken, bisa jadi tempat simpan pinang dan sirih. Pokoknya bisa jadi macam-macam. Yang penting ada model. Nanti boleh ditiru”, kata Yakomina Maniburi. Satu lembar tikar pandan dengan ukuran lebar dan panjang matras karet para pendaki gunung dijual hanya Rp. 150.000. “Tapi bisa kurang. Ini bukan harga pas”. Perempuan itu tersenyum. Giginya tampak merah karena sedang mengunyah pinang.

Yerisiam Gua, seperti suku-suku asli Papua lain yang berdiam di daerah pesisir pantai dan bantaran sungai, mewarisi dari leluhurnya keahlian untuk memanfaatkan daun pandan, rotan, atau beragam kulit kayu sebagai bahan dasar kerajinan dan peralatan penunjang aktivitas lain. Mereka mampu membuat cawat dan selimut kulit kayu, atau kantong kedap air hujan untuk menyimpan korek yang dibuat dari kulit pohon Nibung.

Namun deforestasi mengharuskan mereka beradaptasi. Kehilangan hutan dan tanah dalam waktu yang cepat mengakibatkan suku-suku asli Papua mesti mengganti mata pencaharian. Juga mengganti pola hidup. Artinya, mereka dipaksa untuk menjadi sesuatu yang berbeda dari pengetahuan yang diwariskan turun temurun. Diharuskan mempelajari sesuatu yang baru dengan sembari berpacu dengan waktu yang berlari kencang.

“Mereka dipaksa untuk menjadi sesuatu yang berbeda dari pengetahuan yang diwariskan turun temurun”.

Mereka juga berhadapan dengan berkurangnya pendapatan yang mempengaruhi kemampuan dan kualitas konsumsi pangan. Hal ini masih diikuti dengan melemahnya akses terhadap pendidikan dan persoalan terkait pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

“Waktu kerja di kelapa sawit, cari waktu untuk tokok sugu susah sekali. Kerja dari pagi sampai malam. Akhirnya gaji cuma habis beli beras. Anak-anak akhirnya jadi macam malas mau makan sugu”, tutur Selina Marariampi. Perubahan juga mendatangkan ketegangan dan konflik. Potensi konflik antara penduduk setempat dan penduduk dari luar yang baru

datang, juga konflik dengan pihak perusahaan dan pemerintah. “Perusahaan menggusur habis rumpun-rumpun daun pandan.” Dorkas Numberi merapikan buku dan pulpen ke dalam noken miliknya.

Malam sudah larut. Pertemuan hari pertama baru saja berakhir. Waktu sudah hampir jam sepuluh malam. “Tidak ada yang peduli dengan itu. Apalagi bapak-bapak. Mereka cuma tahu saja sudah ada tikar. Tapi tidak sadar bahwa pandan hutan itu sudah bahan utamanya. Pas digusur, banyak yang bilang tidak apa-apa, Nanti bisa tumbuh lagi”. Wajahnya tampak kelelahan.

Campuran antara rasa lelah seharian belajar dan rasa kesal karena kehilangan hutan. Ia benar. Problem mengenai keberadaan sumber bahan dasar untuk kerajinan tangan sering luput dari meja diskusi dan aksi praksis. Narasi tentang deforestasi terlalu melayang di ruang hampa karena gagal mengakar pada kenyataan. “Padahal kami mama-mama yang paling rugi hutan ini habis. Tidak bisa lagi bikin buah tangan,” kata Fitri Yoweni.

Di antara rentetan konflik tersebut, kaum perempuan memang menjadi kelompok yang paling rentan. Perempuan mengalami dan menjadi korban kekerasan dan diskriminasi dari perubahan-perubahan tersebut. Perempuan kemudian tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan hak atas tanah, tidak mendapat pembagian dari kompensasi, menjadi korban kekerasan fisik dan psikis di rumah dan tempat kerja, kehilangan sumber pangan berkualitas yang berpengaruh pada menurunnya daya tahan kesehatan, akses terhadap sumber daya alam dan lain sebagainya.

Perempuan mengalami kekerasan berlapis yang dialami dari rumah, di lingkungan kerja sebagai buruh, hingga hak-haknya sebagai warga di kampung. “Kalau mau ikut bicara, sering kalah dengan suara besar dari laki-laki. Jadi lebih baik diam saja.” Yuliana Akubar menjelaskan kepada saya mengapa ia jarang buka suara di pertemuan umum suku di balai adat. Meski tergolong aktif hadir, ia lebih sering menyampaikan saran secara informal.

Di level negara, sebenarnya telah ada kebijakan mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Pemerintah menghasilkan Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan di daerah konflik. Pemerintah Provinsi Papua juga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 tentang Perlindungan Korban kekerasan dalam Rumah Tangga. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kekerasan, melindungi korban dari ancaman dan tindakan kekerasan, serta memberikan akses dalam penegakan hukum bagi perempuan.

Namun kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan asli Papua masih saja kerap terjadi. itu sebabnya, memperkuat inisiatif dari kelompok perempuan menjadi aksi penting. Penguatan kapasitas tidak hanya berkisar pada terbentuknya pemahaman yang utuh mengenai hak-hak perempuan, tapi juga kemampuan untuk mengidentifikasi potensi diri, potensi komunitas dan potensi sumberdaya alam di sekitar perempuan yang dapat dikelola secara mandiri, kolektif, dan berkelanjutan. Kemampuan mengidentifikasi ragam potensi tersebut dapat dimulai dengan membuka pemahaman dasar mengenai posisi dan peran perempuan selama ini. Pemahaman dasar ini juga diharapkan dapat menajamkan analisa mengenai hambatan-hambatan yang membatasi berkembangnya peran perempuan dalam pemenuhan hak-haknya.

Kalau bisa ada pelatih yang bisa datang ke Sima. Jadi kami tidak hanya bikin tikar saja. Kan orang kota tidak tidur di tikar lagi. Mereka sudah tidur di kasur.” Yuliana Akubar melirik saya. “Bantu ajar kami di sini cara bikin tas orang kota, bikin dompet atau bikin barang lain. Bikin semua yang bisa laku dijual.” ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah antropolog, bekerja sebagai peneliti di International Institute of Research and Education (IIRE). Artikel juga dapat dibaca di www.suarapapua.com/2017/12/15/perempuan-papua-deforestasi-dan-kekerasan/

Kajian Tipologi Kemiskinan

(Bagian 2)

Oleh **AGUSSALIM**



Kondisi Kemiskinan di Tiga Tipologi Wilayah: Apa yang bisa dilakukan?

Di Provinsi Gorontalo, kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan tampaknya berasosiasi dengan aspek wilayah, dimana rumah tangga yang berada dalam wilayah perdesaan memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibanding rumah tangga di wilayah perkotaan dan pesisir. Dari hasil survei di tiga tipologi wilayah (perkotaan, perdesaan, dan pesisir) di Provinsi Gorontalo, secara umum dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan pendapatan (*income poverty*) dan kemiskinan

non pendapatan (*non-income poverty*), lebih dominan terlihat pada rumah tangga miskin di wilayah perdesaan dibandingkan di wilayah perkotaan dan pesisir. Dengan kata lain, mereka yang bermukim di wilayah perdesaan hidup dengan kondisi yang lebih miskin ketimbang mereka yang bermukim di wilayah perkotaan dan pesisir. Dari perspektif kebijakan, itu berarti upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan akan relatif lebih sulit ketimbang dua wilayah lainnya. Meski demikian, lokus penanggulangan kemiskinan justru harus lebih diarahkan pada wilayah perdesaan, yang selama ini menjadi tempat konsentrasi penduduk miskin.



Rendahnya kualitas sumberdaya manusia menjadi penyebab dan sekaligus kendala bagi upaya penanggulangan kemiskinan di daerah ini. Secara umum, tingkat pendidikan formal anggota rumah tangga miskin sangat rendah. Sekitar 34 persen anggota rumah tangga miskin tidak pernah sekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Hampir setengah dari seluruh anggota rumah tangga miskin hanya mampu menyelesaikan jenjang pendidikan SD. Bisa diduga, tingkat pendidikan penduduk miskin di wilayah perkotaan relatif lebih baik dibandingkan di wilayah perdesaan dan pesisir. Selain itu, di kalangan penduduk miskin, masih terdapat 9,41 persen yang masih buta aksara

(tidak bisa membaca dan menulis), dimana wilayah perdesaan menunjukkan angka paling besar, yaitu mencapai 12,29 persen. Kondisi ini telah menyulitkan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan di daerah ini.

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia rumah tangga miskin telah memberi implikasi yang luas terhadap kondisi ketenagakerjaan. Lebih setengah (sekitar 55%) dari seluruh anggota rumah tangga miskin, tidak bekerja, baik sebagai ibu rumah tangga, sedang bersekolah, maupun sebagai pengangguran. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan diantara ketiga tipologi wilayah. Namun jenis pekerjaan bagi mereka yang bekerja terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Penduduk miskin yang bekerja di wilayah perkotaan, pada umumnya bekerja sebagai buruh dan pekerja jasa. Di wilayah perdesaan, pada umumnya bekerja sebagai petani dan buruh tani. Sedangkan di wilayah pesisir bekerja sebagai nelayan dan petani. Namun keseluruhan jenis pekerjaan ini memiliki ciri yang sama: memberi balas jasa ekonomi yang relatif rendah, yang tercermin dari pendapatan yang mereka terima. Kombinasi antara tingginya proporsi anggota rumah tangga miskin yang tidak bekerja, rendahnya balas jasa ekonomi yang diterima dari pekerjaan, dan besarnya beban tanggungan kepala rumah tangga miskin (rata-rata 5,5 jiwa) menjadi penjelaras terjadinya kemiskinan di daerah ini.

Dari sisi kemiskinan pendapatan, secara rata-rata, rumah tangga miskin di wilayah pesisir memperoleh pendapatan yang relatif lebih besar dibandingkan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Bahkan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga miskin di wilayah pesisir 46 persen lebih besar dari wilayah perdesaan dan 11 persen lebih besar dari wilayah perkotaan. Pendapatan kepala rumah tangga, juga ditopang oleh anggota rumah tangga. Sekitar 21 persen anggota rumah tangga miskin juga memperoleh pendapatan. Proporsi tertinggi ditunjukkan oleh wilayah perkotaan dan terendah di wilayah pesisir. Namun anggota rumah tangga miskin di wilayah pesisir memperoleh pendapatan yang relatif paling besar dibandingkan dua wilayah lainnya.

Dua per tiga dari total pengeluaran rumah tangga miskin digunakan untuk konsumsi

bahan makanan. Wilayah perdesaan menunjukkan proporsi yang relatif lebih tinggi, bahkan mencapai hampir tiga per empat. Sebaliknya wilayah pesisir menunjukkan angka yang paling rendah, sehingga proporsi konsumsi non-makanan di wilayah pesisir relatif paling besar. Ini mudah dipahami mengingat tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga miskin di wilayah pesisir memang relatif lebih besar dibandingkan dua wilayah lainnya. Dukungan teorinya jelas, bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin kecil proporsi dari pendapatan tersebut yang dialokasikan untuk konsumsi bahan makanan.

Dari sisi kemiskinan non pendapatan, meskipun hampir 90 persen bangunan tempat tinggal rumah tangga miskin adalah milik pribadi, namun kondisinya kurang memadai berdasarkan ukuran daya tampung maksimal bangunan, material bangunan, dan fasilitas lainnya, seperti sanitasi, bahan bakar memasak, air bersih, dan sebagainya. Secara umum

kondisi bangunan tempat tinggal di wilayah perkotaan dan pesisir relatif lebih baik ketimbang di wilayah perdesaan. Selain itu, kepemilikan aset lainnya seperti kendaraan bermotor, alat elektronik, dan hewan ternak, juga lebih baik di wilayah pesisir dan perkotaan ketimbang di wilayah perdesaan.

Dari perspektif keberlanjutan penanganan, pemerintah Provinsi Gorontalo tampaknya perlu meninjau kembali data rumah tangga miskin penerima bantuan. Meski sebagian besar rumah tangga miskin telah menerima lebih dari satu hingga empat jenis bantuan dari pemerintah, namun beberapa rumah tangga miskin mengaku tidak pernah menerima bantuan. Pada saat yang sama, evaluasi terhadap program bantuan yang telah diberikan kepada rumah tangga miskin juga perlu dilakukan, terutama kesesuaian bantuan dengan kebutuhan rumah tangga miskin, serta



dampak bantuan terhadap peningkatan taraf hidup rumah tangga miskin.

Dari perspektif intervensi, upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan perlu lebih berfokus pada aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah tangga miskin di seluruh tipologi wilayah. Pemerintah perlu merancang berbagai program yang bertujuan untuk: (i) mengurangi jumlah penduduk miskin yang buta aksara, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat; (ii) meningkatkan akses penduduk miskin terhadap layanan pendidikan dan sekaligus menekan angka siswa miskin yang putus sekolah; dan (iii) mengintensifkan program pemberdayaan penduduk miskin, melalui pemberian bantuan peningkatan keterampilan.

Pemberian bantuan modal usaha kepada rumah tangga miskin tampaknya harus dilakukan secara paralel dengan pemberian keterampilan dan kegiatan pendampingan usaha. Ini penting, mengingat fakta lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk

miskin tidak memiliki keterampilan dan juga tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisis peluang bisnis/usaha. Selain itu, sebagian besar penduduk miskin juga mengaku tidak pernah sebelumnya terlibat dalam kegiatan usaha yang bersifat mandiri. Bahkan terdapat penduduk miskin yang mengaku pernah memiliki usaha - meskipun persentasenya relatif kecil - tetapi kemudian mengalami kegagalan.

Mengingat pendapatan rumah tangga miskin relatif kecil, maka pemerintah Provinsi Gorontalo perlu memaksimalkan upaya yang dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain, menjamin harga bahan makanan pokok agar tetap stabil dan tetap terjangkau oleh rumah tangga miskin, mengingat proporsi terbesar pendapatan rumah tangga miskin dialokasikan untuk membeli bahan makanan. Bantuan bahan makanan berupa beras miskin (Raskin) perlu tetap dilanjutkan dengan memastikan lebih tepat sasaran dan benar-benar menjangkau seluruh rumah tangga miskin. Asuransi kesehatan (BPJS dan KIS) dan bantuan pendidikan (KIP dan beasiswa bagi siswa miskin) harus dipastikan benar-benar dapat menjangkau seluruh anggota rumah tangga miskin agar biaya layanan kesehatan dan pendidikan tidak perlu lagi dikeluarkan oleh rumah tangga miskin.

Terakhir, untuk menanggulangi kemiskinan non-pendapatan, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) perlu terlibat secara aktif dalam perbaikan infrastruktur fisik rumah tangga miskin. Program bedah rumah, perbaikan sanitasi, perbaikan lingkungan pemukiman, peningkatan akses terhadap energi listrik dan air bersih, dan sebagainya, merupakan sejumlah bentuk intervensi yang direkomendasikan untuk memperbaiki kualitas hidup penduduk miskin di daerah ini. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan Bappeda Provinsi Gorontalo dimana Penulis sebagai tenaga ahli. Penulis adalah Focal Point Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JIKTI)/Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Penulis dapat dihubungi melalui email : agus_jero@yahoo.com



Foto : Adwinata Sulihin/ANTARA FOTO



Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Melalui Manajemen Berbasis Sekolah

Oleh **N. J. TANGKEPAYUNG**

B

erjalannya tata kelola pelayanan pendidikan di sekolah dasar yang berkualitas dapat tercipta melalui kerjasama lintas sektor antara satuan

perangkat pendidikan, pemerintahan kampung, pemerintahan distrik dan dinas pendidikan di kabupaten.

Untuk mendorong tercapainya kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan bekerjasama dengan Program KOMPAK LANDASAN 2 di tiga distrik (daerah administrasi setingkat kecamatan) mengadakan Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Berbasis Sekolah di Distrik Oransbari, Ransiki dan Mowiwaren.

Pelatihan dan pendampingan ini dibuka langsung oleh Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran, ST. Dalam sambutannya, beliau



Foto : N.J. Tangkepuyung/Yayasan BaKTI

Team Leader Program LANDASAN 2, Don K. Marut memberikan sambutan dan motivasi kepada peserta pelatihan dan terima kasih kepada pemerintah daerah atas dukungannya.

menyambut baik kegiatan pelatihan dan pendampingan ini. Kegiatan berlangsung secara paralel di tiga distrik selama empat hari dari 15 – 18 Januari 2018 bertempat di Aula Sekolah Dasar Inpres 30 Ransiki, Aula Sekolah Dasar Negeri 08 Oransbari dan Aula Sekolah Dasar 74 Siwi. Pelatihan yang diikuti oleh 74 orang peserta terdiri dari perwakilan kepala sekolah, perangkat kampung, guru, staf distrik dan staf Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.

Disela pelatihan, Tim LANDASAN 2 mendapatkan kesempatan bertemu dengan Bupati Manokwari Selatan (16/1). Bapak Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk Program KOMPAK LANDASAN 2 di tiga Distrik Manokwari Selatan, yang telah melakukan banyak perubahan di sektor kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta perencanaan pembangunan di kampung. Beliau berharap ke depan, program ini tetap berada di Manokwari Selatan untuk terus melakukan

penguatan kapasitas bagi aparat dan pelaku pembangunan lintas sektor yang diintervensi. Pemerintah Manokwari Selatan berkomitmen untuk tetap menjaga hubungan kerja sama dan memberikan dukungan, bantuan yang diperlukan dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Beberapa kemajuan dan capaian dari empat hari pelatihan dan pendampingan ini diantaranya peningkatan kemampuan stakeholder pendidikan (kepala sekolah, guru dan komite sekolah) dalam menyusun beberapa SOP (*Standard Operating Procedure*) sekolah, pihak sekolah mampu mengidentifikasi kebutuhan sekolah, dan keinginan yang kuat dari peserta untuk menjalin kerja sama yg lebih baik. Pelatihan ditutup secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Drs. Simson Aronggear, MM. Kegiatan yang sama juga diadakan di sembilan kabupaten lain di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Australia melalui kerjasama bilateral dengan Pemerintah Indonesia untuk pengentasan kemiskinan sesuai RPJMN 2015 - 2019 melalui peningkatan layanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan HIV & AIDS serta tata kelola pemerintah kampung dan catatan sipil yang diimplementasikan di Papua melalui Program KOMPAK LANDASAN 2 bekerjasama dengan Yayasan Bursa Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan pemerintah daerah di 24 distrik dan 10 kabupaten di Provinsi Papua Barat dan Papua. ●

Sinergi Untuk Memperkuat Komitmen Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Jayapura



Foto : N.J. Tangkayung / Yayasan BaKTI



Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura akan mengalokasikan sekitar Rp. 20 juta di tahun anggaran 2018 untuk sektor penanggulangan Narkoba dan HIV & AIDS. Dukungan ini sebagai bentuk komitmen untuk memberdayakan peran pemerintah kampung dalam usaha penanggulangan HIV & AIDS. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura Frits Rumayomi pada Lokakarya Tokoh Agama, Tokoh Adat, Organisasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam Memperkuat

Komitmen Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Jayapura.

Kegiatan yang berlangsung 14 Februari 2018 dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dr. Yohana Kaut, M.Kes. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa HIV & AIDS ini adalah penyakit yang perlu ditanggulangi secara bersama. Untuk itu diperlukan sinergi dari tokoh agama, tokoh adat, organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama berkomitmen bekerja dalam usaha penanggulangan HIV & AIDS di Jayapura.

Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, hingga Tahun 2017 tercatat 2.576 kasus HIV, merupakan 2,1% dari angka prevalensi nasional 2,3%. Bila melihat unit



Foto : N.J. Tangkepuyang / Yayasan BaKTI

layanan terdepan di Kabupaten Jayapura, terdapat 11 Puskesmas dengan layanan pengobatan Antiretroviral (ARV), 6 Puskesmas inisiasi ARV, 3 Puskesmas Pra-inisiasi ARV dan 2 Puskesmas persiapan.

Peserta lokakarya yang berasal dari tokoh adat, tokoh agama, perempuan, guru sekolah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Jayapura berdiskusi untuk mengidentifikasi permasalahan terbesar HIV & AIDS dalam komunitasnya, apa saja yang telah atau akan dilakukan, bagaimana sistem layanan dan mekanisme kerjasama dengan mitra terkait. Hasil diskusi ini kemudian akan diserahkan kepada Bappeda Kabupaten Jayapura sebagai bahan untuk ditindaklanjuti.

Lokakarya ini merupakan bagian dari salah

satu dukungan Pemerintah Australia melalui kerjasama bilateral dengan Pemerintah Indonesia yang juga tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yaitu peningkatan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan HIV&AIDS serta tata kelola pemerintah kampung dan catatan sipil. Di Provinsi Papua Barat dan Papua diimplementasikan melalui Program KOMPAK LANDASAN 2 bekerjasama dengan Yayasan Bursa Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui tentang Program LANDASAN, dapat menghubungi info@bakti.or.id

Benarkah Teknologi Ruang untuk Laki-laki?



Ilustrasi : Frans Gosali

Oleh **ANDI MISBAHUL PRATIWI**

Laki-laki diberikan mainan robot dan perempuan diberikan boneka. Sejak saat itu tanpa sadar kita memberikan label kepada barang-barang tertentu, mainan maskulin dan mainan feminin.



iskursus mengenai relasi perempuan dan teknologi telah lama diperbincangkan setidaknya sejak dua dekade lalu. Relasi perempuan dan teknologi kerap kali

dipertanyakan dalam berbagai kasus. Seperti pendapat Marry O'brien dalam bukunya *The Politics of Reproduction* bahwa operasi terhadap perempuan bukanlah disebabkan semata-mata oleh biologi perempuan di dalam dan atas biologi itu sendiri, melainkan karena kecemburuan laki-laki terhadap kemampuan reproduksi perempuan dan hasrat yang mengikutinya untuk mengambil kendali atas biologi perempuan melalui alat teknologi dan ilmu pengetahuan. Reproduksi teknologis menyesuaikan dengan kekuatan reproduksi perempuan, dan menempatkannya ke tangan laki-laki, yang kini mempunyai kendali bukan saja atas sperma melainkan juga atas teknologi reproduksi. Terlihat bahwa ada ketakutan akan kendali teknologi reproduksi terhadap tubuh perempuan. Sedangkan para pemikir feminis sosialis yang mengungkapkan bahwa ada persoalan pada teknologi-mesin produksi. Feminis sosialis beranggapan bahwa teknologi produksi membawa dampak negatif untuk

pekerja perempuan dan ini menjadi awal mula bagaimana perempuan anti terhadap teknologi. Teknologi industri didesain untuk laki-laki dan didefinisikan maskulin.

Teknologi telah lama jauh dari perempuan, teknologi kerap kali juga dianggap sebagai ruang laki-laki. Teknologi sebagai ruang laki-laki juga turut dikonstruksi oleh budaya patriarki yang hendak mengeksklusikan dari peradaban. Mengapa tidak? teknologi menjadi salah satu penanda kemajuan zaman, dalam kultur patriarki hanya laki-laki yang diperbolehkan untuk menguasai peradaban, maka laki-laki juga yang hendak menguasai teknologi. Oposisi biner yang dimainkan juga kerap kali mengeksklusikan perempuan dari teknologi dan hendak mendekatkan perempuan dengan alam dan budaya. Misalnya pemikiran ekofeminisme yang menganggap bahwa perempuan adalah dewi, yang natural, dan dekat dengan alam sehingga perlu dilihat secara kritis bagaimana posisi perempuan dalam perjuangan, dikotomi gender akhirnya seperti pisau bermata dua, bisa merugikan dan menguntungkan perempuan. Namun Donna Haraway mengasumsikan bahwa perempuan juga setengah mesin, perlu dan harus didekatkan dengan teknologi. Haraway menekankan bahwa sains dan teknologi perlu diberikan makna baru dan entitas baru.

Dalam kajian UNESCO: *A Complex Formula: Girls and Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics in Asia* tahun 2015, dinarasikan pelbagai sebab dan langkah pemberdayaan untuk menutup gap tersebut. Secara global dilaporkan bahwa hanya ada 30% perempuan dalam STEM (*Sains, Technology, Engineering & Mathematics*). Di Asia sendiri hanya ada 18% perempuan. Seperti dalam hadiah Nobel, hanya ada 2 perempuan yang memenangkan dalam bidang STEM, dan tak ada satu pun perempuan dari Asia. Jelas di sini dapat disimpulkan ada defisit perempuan dalam ICT (*Information and Communication Technologies*)- STI (Sistem Teknologi Informasi) dan STEM. Konstruksi terhadap teknologi tersebut mengakibatkan representasi perempuan sangat minim di dalam bidang teknologi dan STEM.

Judy Wacjman seorang profesor di Departemen Sosiologi di London *School of Economics* banyak melakukan kajian mengenai sains dan teknologi. Ia mencurigai bahwa minimnya representasi perempuan di dunia teknologi tidak serta merta karena perempuan tidak mampu menguasai bidang tersebut. Wacjman dalam publikasinya "*Feminist Theories of Technology*" hendak melihat bagaimana relasi antara perempuan dan teknologi dengan kajian interseksionalitas antara kajian feminis dan kajian STS. Wacjman mengajukan teori yang lebih baru bukan hanya sekadar *women and technology* tapi *technofeminism* untuk mengintrogasi relasi gender dalam teknologi. Wacjman mempertanyakan bagaimana teknologi berperan dalam relasi kekuasaan berbasis gender. Kritik lain juga datang dari Donna Haraway seorang pakar dalam bidang sains, yang dijuluki sebagai feminis tekno-sains. Banyak karya Haraway, baik buku dan jurnal, berfokus pada perlawanan atas bias maskulin dalam budaya sains, yang dia sebut dalam esai ini sebagai "*informatics domination*" - dominasi informasi yang sifatnya maskulin, dan informasi ini merupakan pengetahuan.

Relasi perempuan dan teknologi secara politis juga telah dibangun dari masa ke masa sehingga bukan hanya merugikan perempuan secara praktis tapi juga dalam waktu panjang. Konstruksi tersebut akhirnya membuat

teknologi 'bergender' atau 'tergenderkan', beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah: (1) Teknologi merupakan aktor kunci dalam membentuk situs teknologi baru sehingga penting untuk dikuasai, kaitannya dengan dunia kerja dan aktivitas ekonomi; (2) Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin masih terjadi di dunia kerja berbasis teknologi, ada keterkaitan khusus antara maskulinitas dengan keahlian teknis teknologi; (3) Teknologi bergender secara material dan simbolis, namun keduanya sangat fleksibel dan interpretatif, tergantung penggunaannya; (4) Citra teknologi sebagai ruang maskulin sangat kuat, meskipun ada ketidaksesuaian; (5) Pengetahuan teknis dan praktik telah tergenderkan, meskipun keduanya tidak relasional; (6) Gaya kerja teknis mungkin bersifat gender, menuntut kekuatan terhadap tekanan yang dianggap tidak bisa dihadapi oleh perempuan; dan (7) Teknologi merupakan elemen penting dalam identitas gender pria yang bekerja dan bermain dengan teknologi.

Mengapa Perempuan tidak Memilih Pendidikan Teknologi?

Secara kronologi dan filosofi Wacjman dan Haraway telah menjelaskan bahwa teknologi sebagai ruang maskulin adalah konstruksi yang diciptakan secara politis untuk menguasai ruang publik. Konstruksi inilah yang pada akhirnya membuat perempuan jauh dari teknologi. Dalam bidang pendidikan dikotomi maskulin dan feminin terus berlanjut dan memengaruhi minat dan ketertarikan perempuan pada bidang tertentu. Sebelum Wacjman dan Haraway, pemikiran tentang relasi perempuan dan teknologi - ruang yang dianggap maskulin telah dibahas secara implisit oleh Mary Wollstonecraft, ia berargumen bahwa jika laki-laki disimpan dalam sangkar yang sama seperti perempuan dikurung, laki-laki pun akan mengembangkan sifat yang sama seperti perempuan.

Mary Wollstonecraft juga mengkritik karya Emile karya Jean-Jacques Rousseau yang menggambarkan perkembangan rasionalitas sebagai tujuan pendidikan yang paling penting bagi laki-laki, tetapi tidak bagi perempuan. Pemikiran Rousseau ini mengandaikan bahwa

murid perempuan yang ideal adalah yang menyibukkan diri dengan musik, kesenian, fiksi, puisi sembari mengasah keterampilannya melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Indikasi tersebut dilihat sejak proses pembedaan mainan anak-anak. Anak laki-laki ketika kecil diberikan mainan mobil, pesawat, robot sehingga mereka terbiasa dengan perangkat 'keras' kemudian anak perempuan diberi mainan boneka dan orang tua mereka tentu tidak akan menukar mainan anak perempuan dan laki-lakinya. Mainan seharusnya bebas nilai, tidak ada kepemilikan gender tertentu sama seperti halnya warna dan ilmu pengetahuan. Hal ini memperlihatkan bagaimana pola pikir dan konstruksi sosial telah lama dibangun. Pembedaan cara-cara pengasuhan dan pendidikan yang membuat perempuan terpinggirkan dari pendidikan teknologi khususnya. Meskipun demikian Wollstonecraft menekankan untuk menjadi manusia yang otonom, perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki.

Seperti yang diungkapkan Simone de Beauvoir *One is not born a woman but rather becomes a woman*, perempuan tidak dilahirkan sebagai perempuan tapi menjadi perempuan. Seperti yang saya ungkapkan diatas bahwa perempuan dan laki-laki sejak lahir mendapatkan pembedaan pengasuhan. Seperti itulah konstruksi gender atas teknologi mula-mula lahir. Laki-laki diberikan mainan robot dan perempuan diberikan boneka. Sejak saat itu tanpa sadar kita memberikan label kepada barang-barang tertentu, mainan maskulin dan mainan feminin. Sehingga jika ada laki-laki yang bermain boneka akan diejek, di-bully, dan dianggap aneh. Sama halnya ketika perempuan memilih sekolah di bidang teknologi, ia menjadi minoritas dan kerap kali harus meninggalkan sifat-sifat femininnya untuk masuk ke dalam dunia teknologi tersebut.

Pemikiran Betty Freidan mengenai sifat-sifat maskulinitas dan femininitas sangat berbeda. Dalam bukunya *The Second Stage* ia menggambarkan apa yang disebut sebagai gaya pemikiran dan tindakan beta, yang menekankan pada 'fluiditas, fleksibilitas, dan sensitivitas interpersonal' sebagai feminin secara budaya, dan menggambarkan gaya

pemikiran dan tindakan alfa menekankan pada 'hierarki, otoritas, kepemimpinan yang secara tegas berorientasi tugas berdasarkan rasionalitas instrumental dan teknologi sebagai maskulin secara budaya. Ide Betty Freidan ini mengandaikan bahwa perempuan dapat memaksimalkan keduanya, yaitu pola alfa dan beta, yang berarti bahwa sebenarnya perempuan tidak perlu meninggalkan femininitasnya untuk setara dengan laki-laki.

Pada budaya patriarki teknologi sebagai sebuah inovasi diklaim menjadi milik laki-laki. Budaya patriarki juga memaksa perempuan menjadi feminin (pasif, masokistik, narsistik) dan mencoba meyakinkan perempuan bahwa ia menyetujui menjadi feminin. Konstruksi sosial tersebut terus melekat pada apa yang disebut *psike perempuan*. Dengan dalih ketidakmampuan perempuan untuk menguasai bidang STEM, maka kultur maskulin ini membuat stereotip gender pada teknologi. Teknologi memasak untuk perempuan dan teknologi pemesinan untuk laki-laki. Meskipun di era millennial ini sudah banyak perempuan yang menekuni bidang STEM, namun masih ada stereotip tertentu yaitu *hard-technology* dan *soft-technology*. Teknik pemesinan, pengelasan, otomotif masih didominasi laki-laki, sedangkan teknik komputer jaringan, multimedia, rekayasa perangkat lunak persentase perempuan cukup baik. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah mahasiswa Kajian Gender Universitas Indonesia dapat dihubungi melalui email pratiwiandi@jurnalperempuan.com. Artikel ini bersumber dari Jurnal Perempuan pada link www.jurnalperempuan.org/blog-muda1

2017: Tahun Advokasi Program MAMPU-BaKTI

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

P

ada 18-21 Desember 2017 bertempat di Hotel Bizz Ambon - Maluku, Yayasan BaKTI melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program MAMPU (Kemitraan Australia

Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Kegiatan diikuti oleh Yayasan Lembaga Penelitian

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) Parepare, Yayasan Kombongan Situru (YKS) Tana Toraja, Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari, Yayasan Arika Mahina (YAM) Ambon, Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (PPSE-KA) Atambua, Belu, dan Kantor *sub office* MAMPU-BaKTI Nusa Tenggara Barat.

Direktur Yayasan BaKTI, M. Yusran Laitupa saat membuka kegiatan ini mengatakan bahwa, aktivitas *monitoring dan evaluation* Program



Jumlah kebijakan yang dihasilkan selama tahun 2017 cukup banyak. Beberapa kebijakan merupakan kontribusi perempuan anggota DPRD.

MAMPU-BaKTI dilakukan setiap akhir tahun untuk mengukur apa yang telah dibuat dan dicapai dalam satu tahun berjalan. Untuk tahun 2017 Yayasan BaKTI dan mitranya fokus pada advokasi kebijakan dan telah melahirkan sejumlah kebijakan, di antaranya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Surat Keputusan, dan *memorandum of understanding* atau MoU.

Sementara *Program Manager* Program MAMPU-BaKTI Lusi Palulungan menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2017 Program MAMPU-BaKTI telah berfokus pada advokasi kebijakan yang diharapkan berkontribusi pada akses perempuan terhadap layanan, sebagaimana Indikator Pencapaian yang diberikan MAMPU kepada Yayasan BaKTI. Pada tahun 2017 beberapa pencapaian cukup

signifikan sehingga pada tahun 2018 akan memudahkan implementasi dari kebijakan yang telah dihasilkan.

Pencapaian dan Pembelajaran 2017

Indikator pencapaian Program MAMPU untuk Yayasan BaKTI adalah Menghasilkan Kebijakan yang Berkontribusi pada Dampak Bagi Akses Perempuan terhadap Layanan. Mengacu pada Indikator tersebut, sepanjang tahun 2017 mitra Yayasan BaKTI telah menghasilkan 26 kebijakan, yang terdiri 4 Perda, 9 Perbup/Perwali, 12 SK, dan 1 MoU. Advokasi tahun sebelumnya (2015-2016) juga telah menghasilkan kebijakan di Ambon, Parepare, dan Maros.

Jumlah kebijakan yang dihasilkan selama tahun 2017 cukup banyak. Beberapa kebijakan merupakan kontribusi perempuan anggota DPRD. Jika tahun 2015 dan 2016, perempuan anggota DPRD Ambon dan Parepare menjadi inisiator pembentukan Perda, maka pada tahun 2017 perempuan anggota DPRD Tana Toraja dan anggota DPRD Maros menjadi inisiator pembentukan Perda, yaitu Perda Kabupaten Tana Toraja No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Perda Kabupaten Maros No. 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak.

Pengalaman pembentukan Perda melalui inisiatif DPRD di empat wilayah program, yaitu DPRD Parepare, DPRD Tana Toraja, DPRD Maros, dan DPRD Ambon, dituliskan menjadi buku panduan pembentukan Perda berjudul *Legislasi Daerah, Panduan Penyusunan Naskah Akademik dan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Inisiatif DPRD Secara Partisipatif*.

Selain Perda yang merupakan kebijakan tertinggi di daerah yang proses pembentukannya harus melibatkan DPRD dan Bupati / Walikota setempat, mitra BaKTI juga mengadvokasi lahirnya Perbup / Perwali untuk implementasi Perda yang telah disahkan.

Capaian yang juga sangat penting adalah membantu SKPD (Satuan Kerja Perangkat



Foto: Frans Gosali/Yayasan BaKTI

Daerah) yang tugas pokok dan fungsinya mengurus Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Strategi (Renstra), di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare, DP3A Kabupaten Tana Toraja, DP3A Kabupaten Maros, DP3A Kota Kendari, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Desa (DP3AMD) Kota Ambon.

Pembentukan dan penguatan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) juga bagian dari advokasi kebijakan. Sebagai lembaga layanan bagi perempuan dan anak, P2TP2A diharapkan menjangkau dan menangani korban perempuan dan anak secara optimal.

Di antara P2TP2A wilayah program, layanan P2TP2A Kota Parepare dan P2TP2A Kota Kendari cukup maju dalam menjangkau korban. Penanganan korban di P2TP2A Kota Parepare telah melibatkan paralegal yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Parepare (DP3A). Sedangkan di Kota Kendari, P2TP2A, Polres, dan RPS membangun Rumah Rehabilitasi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.

Sepanjang tahun 2017 jumlah kasus yang terlupakan dan tertangani di enam wilayah sebanyak 399 kasus. Dari jumlah kasus tersebut sebanyak 65 % ditangani oleh P2TP2A. Dari jumlah kasus tersebut sebanyak 210 kasus atau 57 % adalah kasus yang dirujuk oleh Kelompok Konstituen (KK).

Dari paparan Monitoring dan Evaluasi Officer Program MAMPU-BaKTI M. Taufan diketahui bahwa jumlah penjangkauan hingga 2017 mencapai 6.442 orang (Tabel 2) dari 6.609 pada tahun 2016, atau mengalami peningkatan 8 %.

Reses Partisipatif

Salah satu pencapaian pada tahun 2017 adalah pengembangan Panduan Reses Partisipatif. Panduan ini dikembangkan berdasarkan praktik Reses Partisipatif oleh anggota DPRD Parepare, Belu, Lombok Timur, Ambon, Tana Toraja, dan Kendari. Reses Partisipatif mulai dikembangkan tahun 2015 dan pertama kali diujicobakan oleh dua anggota DPRD Parepare, Andi Nurhanjayani dan Jhon Pananganan.



Foto : Frans Gosali/Yayas

JUMLAH PENJANGKAUAN THN 2017

Penjangkauan	Jumlah
DPR RI	1
Pemerintah Pusat	1
DPRD Kab/Kota	75
CSO	527
CBO	2.149
Media	80
Tokoh Masyarakat/ Tokoh Adat	48
Perusahaan	4
Akademisi	3
Community Leader	70
Anggota Masyarakat	2.972
SKPD	480
APH	13
JUMLAH	6.422



Foto : Frans Gosali/Yayasan BaKTI

Hingga tahun 2017 sebanyak 33 anggota DPRD telah melaksanakan Reses Partisipatif, yang terdiri dari 14 perempuan dan 19 laki-laki. Selain itu, di Parepare telah dilakukan Pelatihan fasilitator mengenai Reses Partisipatif dengan menggunakan Panduan Reses Partisipatif.

Reses Partisipatif terus disosialisasikan di wilayah Program MAMPU-BaKTI, termasuk kepada mitra nasional Program MAMPU, sehingga diharapkan menjadi salah satu model Reses yang dapat digunakan secara nasional.

2018: Fokus pada Layanan Berbasis Komunitas

Untuk tahun 2018 Program MAMPU-BaKTI fokus pada pengembangan dan penguatan layanan berbasis komunitas. Ini dimaksudkan untuk lebih memperkuat layanan di komunitas dan menghubungkannya dengan layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Sejak pembentukan Kelompok Konstituen tahun 2014/2015, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penanganan kasus. Pengalaman penanganan kasus di Kelompok Konstituen akan diperkuat untuk meningkatkan penanganan kasus di komunitas, khususnya penanganan perempuan korban kekerasan.

Di samping mempunyai kemampuan penanganan kasus di komunitas, Kelompok Konstituen diharapkan terhubung dengan layanan di tingkat kabupaten/kota. Ini sangat penting agar layanan pemerintah yang ada di kabupaten/kota dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, di samping itu layanan di komunitas pun terhubung dengan lembaga layanan yang lebih tinggi. Dengan demikian, advokasi kebijakan pada level kabupaten/kota melalui pembentukan Perda dan Perbup/Perwali serta penguatan DP3A dan P2TP2A dapat segera terimplementasi di tingkat masyarakat. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Database & Publikasi Media Officer MAMPU-BaKTI dan dapat dihubungi melalui email ghufran@bakti.or.id



Menjemput Harapan di Bastem Utara

Oleh **M. YUSUF WEANDARA**

Perjalanan panjang yang m e l e l a h k a n terbalaskan dengan tuntas oleh kepingan *landscape* yang menghampar luas di kaki pegunungan. Sayup terdengar nyanyian burung hutan yang berbalas pantun. Lereng gunung yang melandai, hijau nian dipenuhi tanaman ilalang yang berliuk-liuk girang diterpa angin sepoi-sepoi. Nampak samar di kejauhan puncak Latimojong yang diselimuti awan mendamaikan ruh yang tak bertuan menyelaraskan alam dan penghuninya. rumah-rumah penduduk yang terselip di antara lebatnya pepohonan khas hutan tropis hamparan sawah, rumah Tongkonan dan binatang legendaris sang pembawa arwah - Tedong Bonga (Kerbau Belang) hidup menyatu

nan bijak dengan alam inilah negeriku negeri Sulawesi, negeri para pejuang dengan sejuta adat dan romannya. Eksotik dan memukau tentunya.

Terik matahari membakar kulit tak menyurutkan niat mengambil gambar, mengabadikan momen romantis di setiap sudut pegunungan di Kecamatan Basse Sangtempe Utara (Bastem Utara) Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Gemulai pohon Pinus menikmati belaian angin di siang itu. Angin yang bertiup pelan mengitari lembah pegunungan membelai dengan mesra setiap yang dilewatinya. Sungguh berat hati ini untuk beranjak. Lembah dengan sejuta pesona memaku diri untuk diam tanpa kata memaksa saya untuk menatap jauh ke depan menikmati setiap kepingan pelangi yang bertebaran di lembah ini. Ini belum setengah perjalanan masih ada tiga jam lebih perjalanan untuk sampai di lokasi tujuan, desa Buntu Tallang. Sebenarnya, ini hari kedua kunjungan saya di Kabupaten Luwu. Hari pertama dan kedua saya habiskan di Desa Lalong yang lokasinya berjarak satu jam dari Kota Palopo dan dua jam dari Kota Belopa.

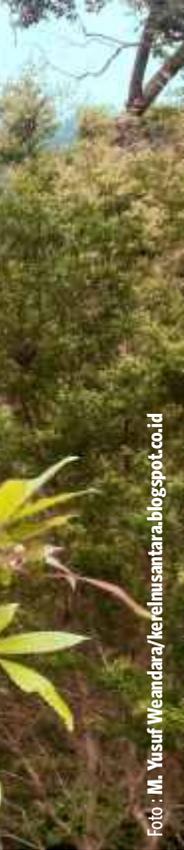


Foto : M. Yusuf Weandara/ke.relusantara.blogspot.co.id

Menuju Desa Bonto Tallang

Hari minggu pukul 09:35 waktu setempat dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam saya memacu si Kuda Besi menapaki jalan raya dari Walenrang menuju Bastem Utara via Latuppa. Sejam kemudian jalanan di dominasi dengan bebatuan cadas khas pegunungan. Jalanan ini mengikis lereng-lereng pegunungan yang ada di daerah Bastem Utara. Jika hujan, kondisi jalanan akan berubah menjadi luapan lumpur, kondisi ini akan menyulitkan akses dari dan menuju ke lokasi ini. Hutan pinus khas tumbuhan dataran tinggi berdiri kokoh di sepanjang perjalanan. Jalan yang sewajarnya hanya ditempuh dengan 4 jam perjalanan, kali ini saya tempuh dengan waktu 6 jam perjalanan. *Landscape* nan indah selalu berhasil menggodaku untuk singgah mengabadikannya dalam

kotak tipis persegi panjang yang disebut dengan *handphone*.

Waktu menunjukkan pukul 16:10 waktu setempat, setelah perjalanan panjang yang melelahkan akhirnya sampai juga di Desa Buntu Tallang Bastem Utara. Sore itu motor yang didominasi lumpur terparkir lesu di bawah kolong rumah Pak Kadir, Kepala Desa Bonto Tallang. Aroma kopi arabika khas Tanah Toraja menyusup centil di indra penciumanku merayap pelan hingga ke otak membakar rasa lelah yang sedari tadi meronta. Ku seruput perlahan kopi ini, ada perasaan sedih bercampur bahagia. Kopi yang sama namun di minum di tempat yang berbeda dan suasana berbeda akan menghasilkan rasa yang berbeda pula. Kata Pak Desa "Kopi itu tidak hanya seni menyeimbangkan rasa pahit dan manis namun lebih kepada menyeimbangkan rasa dan perasaan". Yang jelas buat saya kopi sore itu adalah air terbaik yang pernah lewat di tenggorokanku sepanjang hari ini. Obrolanpun berlanjut melantun pelan mengiringi senja hingga malam mulai merangkak dari balik pegunungan membawa sejuta misteri untuk saya pendaatang baru dengan penuh tanya penasaran apa dan bagaimana saya melewati

malam di tengah belantara hutan di Tanah Luwu.

Pagimu Tak Seindah Pagiku

Suara gaduh anak Pak Dusun membangunkanku dari tidur yang nyenyak. Kutarik selimut pemberian tuan rumah, badan ini terjat dengan kantuk dan dingin yang menggerayangi setiap sendi di badan. Kupaksakan mata terbuka, samar-samar kulihat anak Pak Dusun sedang mengenakan seragam SD bersiap-siap hendak ke sekolah. Kulirik jam tangan *outdoor* yang selalu setia menemani petualanganku waktu menunjukkan pukul 05:45 cepat sekali anak ini ke sekolah... Kataku. Seketika itu pula egoisme membongkar kemalasanku jika anak SD saja bangun jam segini, lantas saya yang sudah menyandang gelar S1 di kampus ternama di Indonesia timur tentu harus bangun jauh sebelum jam 5 subuh.

Pukul tujuh lewat seperempat, setelah mencuci muka dan bersikat gigi saya dan Pak Ilam duduk santai di teras rumah. Rumah Pak Ilam cukup besar untuk menampung keluarga kecilnya, rumah ini belum lama berdiri dindingnya masih berwarna asli, asli belahan kayu dengan gaya rumah panggung khas rumah Sulsel pada umumnya. Rumah ini berada pas di samping patahan tektonik yang di bawahnya berbaris hamparan sawah dengan model terasering di sebelah timurnya rangkaian pegunungan membatasi sawah tersebut. Embun pagi mulai turun perlahan berarak menuju pemukiman bergerak pelan menyapa alam. Matahari pagi memanjat pelan dari balik pegunungan cahayanya lembut membelai dedaunan seakan berbisik kepada setiap makhluk yang ada di sana "waktunya bangun wahai makhluk tuhan saatnya menaklukkan dunia". Tak ketinggalan suara burung pagi, ayam dan beberapa ternak sahut menyahut menyambut sang fajar.

Tongkonan, Rumah Adat Bangsawan Toraja

Sambil sesekali menyeruput kopi Toraja yang khas aromanya. Saya pun mulai membunuh kebisuan dengan beberapa pertanyaan kepada Pak Ilam. Pak Ilam adalah Kepala Dusun Kajuara perawakannya cukup tinggi dan berbadan besar umurnya sekitar 40 an dia memiliki seorang istri dan dua orang anak. Pak Ilam ini penduduk asli Bastem Utara penganut Protestan yang taat.

Di pekarangan rumah Pak Ilam berdiri Rumah Tongkonan yang masih baru namun ukurannya agak kecil hanya untuk menerima tamu adat dan menyimpan padi. Menurut keterangan Pak Ilam tidak semua masyarakat Bastem memiliki rumah Tongkonan di pekarangan rumahnya hanya mereka-mereka yang berketurunan bangsawanlah yang memiliki hak dan berkewajiban untuk membuat rumah Tongkonan. Di Desa Buntu Tallang sendiri hanya beliau dan Pak Desa yang memiliki rumah Tongkonan. Untuk satu rumah tongkonan ini, biasanya memakan waktu 2 sampai 3 bulan lebih masa pembuatannya. Kayu yang dipilihnyapun bukan kayu sembarangan tapi kayu khusus yang tumbuh di tengah hutan pegunungan Bastem dan tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk memindahkannya ke tengah perkampungan. Untuk satu tongkonan ini menghabiskan dana sekitar 80 sampai 100 juta dan biaya ini akan berkali-kali lipat lagi jika dibuat di daerah kota di Tana Toraja.

Potensi yang Terpendam

Bastem Utara adalah kecamatan ke-22 yang ada di Kabupaten Luwu dibentuk pada tahun 2012 yang lalu dengan Ibukota Desa Pantilang. Kecamatan Bastem Utara terdiri dari 12 desa salah satunya Desa Buntu Tallang. Di sebelah barat Desa Buntu Tallang berbatasan dengan Desa Tede dan Desa Pantilang di utara berbatasan dengan Enrekang dan Tanah Toraja, Timur dan Selatan berbatasan dengan daerah Belopa dan Palopo. Jika kita berada di rumah Pak Kadir (Kepala desa Buntu Tallang) samar-samar akan nampak puncak dari Gunung Latimojong satu dari sekian gunung di Sulsel yang eksotik.

Dari 12 desa di Kecamatan Bastem utara hanya Desa Buntu Tallang yang penduduknya terbilang cukup kecil hanya sekitar 100 kepala keluarga yang menyebar di 4 Dusun yaitu Dusun Tallang, Dusun Kajuara, Dusun Bulu dan Dusun Parampanan dari ke 4 dusun tersebut Dusun Tallang yang memiliki kepala keluarga terbanyak ada sekitar 26 kepala keluarga yang bermukim. Menurut keterangan Pak Desa dulunya penduduk desa ini cukup banyak, hanya saja banyak dari mereka yang berpindah penduduk dengan berbagai alasan seperti alasan menikah dan mencari pekerjaan. Anak-anak muda di sini umumnya merantau jika

sudah memasuki usia dewasa sangat sedikit yang ingin tinggal dan meneruskan pekerjaan orang tuanya. Lahan-lahan pertanian banyak yang terbengkalai tak mampu lagi digarap oleh manusia yang berusia 60 atau 70 tahun ke atas. Harga permeter tanah disini berapa Pak??? Kataku bercanda. Tak ada tanah yang dijual di sini kamu bebas memilikinya sekuat yang bisa kamu miliki... jawab Pak Ilam penuh semangat.

Antara Mimpi dan Pengharapan

Topografi Desa Buntu Tallang yang berupa pegunungan sangat mendukung potensi pariwisata yang mengandalkan pemandangan bentang alam seperti hamparan hutan, kabut, sawah, gunung dan bunyi-bunyian burung. Rumah-rumah warganya yang berada di daerah lereng gunung bisa menjadi sumber daya untuk dijadikan penginapan alternatif para turis dengan konsep “Kemping di rumah warga” selain itu kondisi suhu yang dingin karena lokasinya berada di ketinggian membuat daerah ini cocok untuk tanaman berjenis palawija.

Sebenarnya ada keinginan dari Pak Desa dan Pak Dusun untuk menjadikan Desa Buntu Tallang sebagai desa Agrowisata seperti yang ada di Bantaeng dan Negeri di atas Awan di Lolai Tana Toraja. Agar melahirkan lahan pekerjaan baru bagi masyarakat utamanya untuk pemuda dan pemudinya, sehingga mereka tidak lagi keluar untuk merantau cukup bekerja di desa saja. Namun keterbatasan pengetahuan dan kondisi infrastruktur yang belum memadai mengharuskan mimpi tersebut di tunda dulu.

Infrastruktur di desa ini masih dalam tahap pengerjaan. Jalanan lorong desa masih dalam proses pengerasan maka jangan heran jika hujan tiba, jalanan di desa ini akan berubah menjadi arena balapan motor cross, lumpur dan lumpur. Namun kita tetap optimis mudah-mudahan tahun depan sudah bisa lanjut ke tahap berikutnya karena sudah dianggarkan melalui dana desa. Kata Pak Ilam. Mayoritas penduduk di sini bermata pencaharian sebagai petani sawah. Ada juga yang berkebun kakao dan cengkeh namun dalam skala kecil.

Masyarakat Buntu Tallang mayoritas beragama Kristen Protestan. Ada juga yang beragama Muslim tapi cuman dua kepala keluarga saja itulah mengapa pembangunan masjid belum juga terealisasi. Jadi untuk sholat Jumat misalnya, masyarakat muslimnya harus



Foto : M. Yusuf Weandara/kerel nusantara.blogspot.co.id

ke desa tetangga yang jaraknya lumayan jauh. Di bidang pendidikan sendiri kondisinya tidak jauh berbeda dengan Masjid. Di sini belum ada sekolah baik sekolah dasar terlebih sekolah lanjutan. Adanya di Desa Tede yang jaraknya juga lumayan jauh makanya anak-anak SD di sini berangkatnya subuh-subuh dan sebagai bentuk toleransi, SD di Desa Tede tidak mematok jam berapa waktu masuk kelas. Patokannya adalah jika anak-anak sekolah dari Desa Tallang sudah sampai di sekolah maka jam pelajaran pun segera dimulai.

Untuk penerangan, di desa ini sudah ada pembangkit listrik sendiri yang digerakkan oleh air. Namun tenaganya masih kecil dan tempat operasionalnya pun masih butuh pembenahan. Sewaktu saya di sana listrik lagi padam soalnya ada pohon yang tumbang akibat angin kencang sehingga memutuskan kabel aliran listrik. Pembangkit listrik ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat desa dan Pak Dusun Ilam bertindak sebagai operatornya.

Adalah harapan bersama agar pemerintah daerah menaruh perhatian lebih untuk daerah-daerah yang memiliki potensi yang belum terkelola maksimal. Seperti halnya yang ada di Desa Buntu Tallang ini. Pembangunan daerah terpencil jangan hanya dijadikan sebagai jualan politik saja. Realisasi dalam bentuk kerja keras itu yang penting, agar kesejahteraan dan pendidikan bisa merata di semua tempat di

Indonesia. Tak dapat kita pungkiri bahwa dukungan dari pemerintah daerah ataupun pusat sangatlah penting dalam kemajuan pembangunan pedesaan. Namun bertindak mandiri, inovatif dan kreatif memanfaatkan sumberdaya yang ada ketimbang selalu menunggu dan berharap. Seyogyanya pembangunan itu dimulai dari aksi nyata masyarakatnya sehingga terjadi sinergitas antara kemauan dan bantuan.

Sudah lama juga rasanya saya duduk bercengkrama dengan Pak Dusun, kayaknya embun tak lagi nampak kopi tak lagi hangat tiba saatnya untuk berkeliling kampung menyelesaikan pekerjaan agar esoknya bisa balik

ke Makassar. Saya pamit ke Pak Ilam untuk membereskan perlengkapan sekaligus meminta kesediaannya untuk menemani berkeliling desa. Setelah beres-beres dan sarapan saya dan Pak Ilam bersepeda motor mengelilingi Desa Buntu Tallang. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tuliskan di buku kecil ini namun biarlah itu menjadi misteri untuk mereka yang berjalan dengan penasarannya. Membuka lembaran demi lembaran mozaik nusantara tidaklah cukup dengan membaca dan membayangkan. Datangi, ceritakan dan sebarkan semangat petualanganmu. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari kerel nusantara.blogspot.co.id

Lakukan Sesuatu untuk **Menghentikan Gaya Menulis Cabul**



Oleh **MUGNIAR MAREKARMA**



uitan apresiasi kepada salah sebuah portal segera saya layangkan usai membaca tulisan yang saya protes sudah berubah menjadi lebih baik. Tulisan berjudul **Meski Sudah Mengaku**

Salah, Pelecehan Seksual oleh Perawat pada Pasiennya Ini Nggak Bisa Diterima! saya protes di kolom komentar post tersebut dan di Twitter. Di Twitter saya mention akunnya dan ditanggapi oleh puluhan orang dengan impresi ribuan.

Berkali-kali membaca berita cabul sejak kecil membuat saya berpikiran bahwa memang seperti itulah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ditulis. Berita cabul yang saya maksud di sini adalah yang menulis membuat berita itu seolah-olah reka ulang adegan pelecehan seksual dengan detail sehingga yang membacanya mampu berimajinasi.

Saya yakin bukan cuma saya yang pernah membaca berita seperti ini. Anda juga mungkin pernah membacanya. Pada tulisan seperti itu tindak pelecehan ditulis dengan detail, bahkan ada yang menambahkannya dengan bumbu penyedap. Saking seringnya, tulisan seperti itu bagaikan kelumrahan di media mana pun di negara ini.

Namun akhirnya saya menyadari kalau yang seperti itu salah setelah beberapa kali mengikuti pelatihan dan diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi berbeda, yaitu: AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Makassar, Yayasan BaKTI, LBH APIK, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sikap saya menghadapi berita cabul pun berubah. Dari yang sebelumnya terpaksa menerima gaya penulisan yang meresahkan itu hingga benar-benar merasa terganggu dan merasa perlu melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Kalau tidak bisa mengubahnya, paling tidak saya bisa memberikan pandangan kepada orang lain bahwa cara penulisan seperti itu salah besar.

Tulisan berjudul 'Meski Sudah Mengaku Salah, Pelecehan Seksual oleh Perawat pada Pasiennya Ini Nggak Bisa Diterima!' yang ditulis oleh Iradat Ungkai ini tayang di Hipwee pada tanggal 26 Januari lalu. Judulnya bagus, jadi awalnya saya pikir kontennya bagus. Kalau dibaca sekilas, seolah-olah maksudnya bagus

tapi kalau mencermati kata demi kata dalam tulisan itu, duhai ... berbagai rasa mengemuka. Mulai dari risih, malu, sedih, hingga marah.

Mengapa saya merasa risih, malu, sedih, hingga marah?

Saya merasa risih, malu, sedih, hingga marah karena saya perempuan. Bagian tubuh yang diekspos dalam tulisan itu adalah bagian tubuh yang juga saya miliki. Yang merasakan hal seperti ini bukan hanya saya, beberapa perempuan mengakui merasakan hal yang sama dengan saya. Penulis mengekspos hingga 5 kali – dua kali dalam tulisan dan dua kali dalam bentuk *screenshot* teks yang dikutip dari video perempuan yang memarahi perawat rumah sakit yang menurutnya telah melecehkan dirinya plus video tentang kemarahan perempuan korban pelecehan seksual di rumah sakit yang viral itu.

Sedih sekali membaca tulisan yang mengeksploitasi tubuh perempuan seperti itu. Ibaratnya korban penulis buat tertimpa tangga setelah jatuh. Ini yang namanya jadi korban berkali-kali. Seharusnya eksplorasi tulisan bukan pada detail tindakan pelecehan yang dilakukan, melainkan pada alasan mengapa tindakan itu tak dapat diterima. Apakah itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam agamakah, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan lain-lain.

Ketimbang ekspos detail pelecehan hingga total sebanyak 5 kali sehingga justru menjadi gambaran besar tulisan itu, sebaiknya tuliskan bagaimana solusi jikalau seorang pasien mendapatkan pelecehan seksual ketika di rumah sakit atau bagaimana caranya supaya tidak dilecehkan ketika sedang terbaring lemah pasca tindakan operasi. Itulah cara yang lebih relevan.

Apa yang terjadi usai protes saya tulis di kotak komentar dan di Twitter?

Usai protes, dukungan pun berdatangan. Sekitar 90% dukungan datang dari kaum perempuan. Sebagian datang dengan spontan, sebagiannya lagi datang ketika saya mendatangi mereka untuk mencari dukungan. Entah ke mana para lelaki. Saya perlu mencari dukungan karena bukan selebtwit (selebritas di tweet land) yang dengan gampang bisa membuat para follower mendukungnya. Saya hanya seorang ibu yang cuma punya sedikit kepedulian dan

Kurang tepat	Disarankan	Keterangan
Siswa nakal, Siswa perilaku buruk	Siswa kurang penurut, Siswa kurang baik	Kata Nakal dan Perilaku buruk adalah pelabelan kurang tepat karena justru pelabelan itu membuat anak semakin nakal.
Perempuan cantik, montok, langsing, molek, semok, aduhai, tubuh mulus	Jangan gunakan kata ini semuanya	Jika penulis menggunakan kata ini maka mempengaruhi pembaca untuk menggambarkan dan membayangkan tubuh objek pemberitaan.
Payudara diremas, Digerayangi, Selangkangan berdarah, Meraba paha, Melucuti pakaian	Jangan gunakan kata ini semuanya	Jika penulis menggunakan kata ini maka mempengaruhi pembaca untuk menggambarkan dan membayangkan tubuh objek pemberitaan.
Indehoy	Berhubungan seksual	Kata Indehoy adalah dari bahasa gaul. Tidak ada padanannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Juga punya makna konotasi buruk.
Pelacur, Perek, Perempuan bayaran, WTS, PSK, Cabe-cabean	Perempuan yang dilacurkan, anak yang dilacurkan	Kata-kata itu terlalu kasar di media massa.
Perempuan bugil, Telanjang	Tanpa busana	Kata bugil dan telanjang berkonotasi kasar.
Cacat	Orang dengan Disabilitas, Orang dengan Difabel, Orang dengan Kebutuhan Khusus	Kata Cacat berkonotasi kasar bagi golongan masyarakat marjinal.
Lesbi, Gay	Pasangan sesama jenis, Homo seksual	Kata Lesbi dan Gay adalah label yang tidak punya tolak ukur kata dan mengandung prasangka.

Beberapa contoh pemakaian kata-kata yang tepat dalam menulis isu perempuan.

keberanian untuk mendesak agar tulisan itu diubah agar menjadi pelajaran di kemudian hari. Kalau tidak bisa bagi semua orang, setidaknya bagi segelintir orang.

Satu reaksi positif kemudian terlihat: admin Hipwee menjawab komentar saya. Saya mengapresiasinya. Admin Hipwee membalas komentar saya dengan meminta maaf atas ketidaknyamanan saat membaca tulisan itu dan mengatakan akan menyampaikannya kepada redaksi.

Mungkinkah melakukan perubahan melalui media sosial?

Jawabannya: mungkin! Kita semua sudah tahu begitu banyak hal yang menjadi viral di zaman now. Kita sama-sama tahu bagaimana ide atau kejadian bisa tersebar di media sosial.

Di grup WA saja, begitu banyak informasi beredar, bahkan yang hoax sekalipun dan bisa membuat orang-orang terpengaruh!

Kita sama-sama tahu kalau media sosial bisa memengaruhi pikiran seseorang maka kenapa tidak saya menggunakan medsos juga? Contoh dalam versi besarnya, petisi dari change.org bisa menghasilkan banyak perubahan. Kenapa tidak, saya mencoba melakukan yang kecil-kecil saja? Ibarat nyamuk yang mengganggu raksasa. Kalau nyamuknya konsisten berdenging dan menggigit si raksasa, pasti raksasa merasa terganggu dan sesaat memerhatikan si nyamuk, kan?

Hasilnya, alhamdulillah, tulisan itu diubah pada tanggal 29 Januari menjadi lebih baik. Meskipun tidak sepenuhnya seperti yang saya inginkan, penggambaran dengan cara

mengekspos tindakan pelecehan (yang seperti menonton adegan reka ulang itu) sudah tidak terbaca lagi.

Apa yang akan saya lakukan kalau protes saya gagal?

Kalau gagal, apakah saya berhenti sampai di situ saja kalau Hipwee tidak bereaksi? Nope. Saya akan mengadukannya kepada pihak (lembaga) yang berwenang membuat Hipwee mengubah kontennya! Mengapa seberani itu? Karena saya tahu saya benar dan cara penulis cabul itu yang salah! Saya berencana meminta dukungan kepada AJI Makassar dalam pelaporan yang akan saya lakukan. Karena berkat AJI, melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakannya, membuat wawasan saya kini terbuka.

Beberapa profesional yang tergabung dalam AJI Makassar baru-baru ini bekerja sama dengan Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) dan didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) sudah membuat Buku Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak. Di halaman 79 buku ini, di bagian tips dikatakan:

Pilih diksi yang tepat agar tidak terkesan melakukan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

Selain itu Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 yang mengatur Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan mengenai tidak bolehnya penulisan cabul dan penyebaran identitas korban. Dalam Pasal 4 disebutkan Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Dalam penafsirannya, cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, gambar dan suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Selain itu dalam Pasal 5 disebutkan Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Sedangkan anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Kalau bukan jurnalis profesional, haruskah mengikuti etika dalam penulisan kasus kekerasan terhadap perempuan?

Ya iya dong. Menulis di website serupa media online ataupun blog pribadi, meskipun bukan jurnalis profesional, bisa dikategorikan sebagai jurnalis warga. Menulis di ranah maya ini perlu mengikuti norma juga. Begitu pun jika hanya sekadar menulis status di media sosial. Bukan hukum rimba yang berlaku. Baru-baru ini, seorang ibu muda diserang ibu-ibu lain se-Indonesia karena menulis status buruk tentang anak berkebutuhan khusus. Ada sanksi sosial, Saudara!

Jurnalis sudah merumuskan 'norma'-nya, sudah sepatutnya diikuti. Mengapa? Karena jurnalis sudah paham dengan risiko dan tantangan yang dihadapi setelah dia menulis dan ada aturan yang harus dia ikuti. Kalau melanggar, ada sanksi yang menanti. Ada lembaga yang berwenang memberikan sanksi kepadanya.

Mereka yang tidak berprofesi sebagai jurnalis profesional, kebanyakan sangat awam, tidak paham dengan segala tantangan risiko. Seperti anak atau remaja yang harus selalu diarahkan oleh orang dewasa terdekatnya ketika bermedia sosial. Maka dari itu, penulis biasa – yang bukan jurnalis profesional – perlu mengetahui aturan yang dipahami jurnalis profesional supaya lebih bisa mengendalikan tulisan dan imajinasinya dan tidak mudah terjerat masalah. Dan baik itu jurnalis profesional maupun warga biasa, sebaiknya tahu mana yang etis dan tidak dalam menulis kasus kekerasan seksual pada perempuan dan mempraktikkannya. Untuk itu, perlu belajar kepada mereka yang biasa melakukan advokasi pada kasus seperti ini.

Kalau tak berkesempatan mengikuti pelatihan seperti yang pernah saya ikuti, yuk belajar dari buku panduan seperti yang telah disusun oleh teman-teman dari AJI Makassar dan Yayasan BaKTI yang saya ceritakan di atas. Kalau Anda berminat, silakan kontak alamat email BaKTI untuk minta dikirimkan e-book-nya. Gratis! ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tulisan ini bersumber dari www.mugniar.com/2018/02/lakukan-sesuatu-untuk-hentikan-gaya-menulis-cabul.html

Salah satu program yang sedang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten adalah menjaga 1000 hari pertama kehidupan.



Foto: Dok. Yayasan BaKTI

BANGGA Papua: Menyusun Strakom Lewat *Assessment*



M

embicarakan Papua, berarti membicarakan sebuah teritori yang unik dari segi geografis, bentangan alam, hingga budaya penghuni aslinya. Sulit melihat sebuah

masalah di Papua dengan pendekatan yang sudah berhasil di tempat lain. Keunikan Papua memang butuh pendekatan khusus, tentu dengan segala risiko dan tantangannya.

Sadar akan hal itu, tim BaKTI-BANGGA Papua juga menerapkan strategi khusus dalam merancang strategi komunikasi dan alat komunikasi untuk program BANGGA Papua. Program BANGGA Papua adalah program perlindungan sosial yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Papua. Melalui program ini, pemerintah Provinsi Papua akan memberikan bantuan sosial kepada Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki anak usia di bawah empat tahun. Tujuan utamanya adalah menjaga

dan meningkatkan kesehatan dan gizi anak tersebut.

Yayasan BaKTI ditunjuk sebagai mitra yang akan merancang strategi komunikasi dan alat komunikasi yang dibutuhkan dalam menjalankan program tersebut. Dua fokus utama yang digarap adalah sosialisasi program dan peningkatan pengetahuan tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak, sesuai dengan tujuan utama BANGGA Papua.

Dalam merancang strategi komunikasi dan alat komunikasi tersebut, BaKTI melakukan beberapa *assessment* lapangan sebagai langkah awal. *Assessment* atau penilaian ini dianggap penting untuk mendata secara lengkap keadaan, budaya, kebiasaan, potensi ataupun ancaman yang ditemui di kabupaten sasaran. Sebagai tahap awal, program BANGGA Papua akan dilaksanakan di tiga kabupaten, yaitu; Asmat, Lanny Jaya dan Paniai.

Sebelum turun ke tiga wilayah tersebut, tim BaKTI terlebih dahulu melakukan *assessment* dengan menemui Kepala Sekretariat Bersama (Sekber) BANGGA Papua tingkat provinsi, LSM yang sudah bekerja lama di Papua, antropolog, akademisi dan praktisi. *Assessment* awal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran awal tentang Papua dan mempelajari pengalaman mereka yang sudah lama bekerja di Papua.

Assessment selanjutnya dilakukan langsung ke tiga kabupaten sasaran, antara tanggal 20

hingga 27 Januari 2018. Tiga tim diturunkan di tiga wilayah tersebut, berbekal perangkat *assessment* yang sudah dikonsultasikan kepada Sekber Provinsi. Tokoh-tokoh utama yang ditemui juga beragam, dari anggota Sekretariat Bersama (Sekber) kabupaten, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, tokoh perempuan, dinas-dinas terkait di kabupaten, LSM lokal yang sudah bekerja di daerah sasaran dan tentu saja tokoh agama.

Temuan Lapangan

Meski berada di pulau yang sama dan dihuni oleh penduduk asli dari ras yang sama, namun ternyata ketiga lokasi tersebut punya perbedaan yang mendasar. Kabupaten Asmat berada di dataran rendah di pesisir selatan Papua dan masuk ke dalam wilayah adat Anim Ha. Sementara Lanny Jaya berada di kawasan pegunungan tengah bagian timur Papua dan masuk ke dalam wilayah adat La Pago. Sementara Paniai berada di pegunungan tengah bagian barat Papua dan masuk ke dalam wilayah adat Mee Pago.

Lokasi yang berbeda itu ternyata sangat memengaruhi budaya dan kebiasaan warganya. Warga asli Asmat misalnya, tidak terbiasa untuk bercocok tanam. Mereka lebih banyak memanfaatkan alam seperti menokok sagu atau menangkap ikan dan kepiting. Orang Lanny Jaya yang sebagian besar berasal dari suku Lanny cukup terbiasa dengan bercocok tanam dan beternak. Mereka punya kebun yang berisi tanaman sayur atau umbi-umbian, dan terbiasa pula beternak babi atau kelinci. Meski begitu, mereka tidak punya kebiasaan menangkap ikan atau udang, karena memang tidak ada perairan di wilayah Lanny Jaya.

Orang Paniai yang lebih banyak berasal dari suku Mee punya kebiasaan yang cukup lengkap. Selain punya kebun, sebagian orang Paniai juga biasa menangkap ikan dan udang di danau Paniai yang memang ada dalam wilayah mereka. Namun, mereka tidak terbiasa beternak seperti yang dilakukan oleh orang Lanny Jaya, misalnya.

Perbedaan yang mendasar dari tiga wilayah itu saja sudah menunjukkan betapa uniknya Papua. Meski punya perbedaan mendasar, namun ternyata dalam persoalan gizi, ketiga wilayah tersebut punya masalah yang sama. Orang Papua, menurut Josephine Gobay – salah satu

Keberadaan pemuka agama dan kebiasaan berkumpul di gereja selepas ibadah tentunya menjadi potensi yang sangat besar untuk membantu sosialisasi program BANGGA Papua dan edukasi masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak.

pegawai dinas kesehatan Kabupaten Paniai – tidak terlalu memusingkan soal gizi. Bagi mereka, 'makan yang penting kenyang, gizi itu urusan belakangan.'

Pernyataan Josephine yang akrab disapa Fince tersebut menguatkan pernyataan John Rahail – akademisi dan pegiat sekolah alam di Sarmi – yang ditemui tim BaKTI sebelumnya. Menurutnya, kesehatan dan pendidikan belum menjadi perhatian penting bagi orang Papua. Asal bisa makan, tidak ada masalah.

Beruntung bahwa masalah gizi di Lanny Jaya dan Paniai yang berada di pegunungan bisa dikatakan masih aman. Orang Lanny Jaya dan Paniai meski belum paham gizi, namun sudah terbiasa menyantap makanan dengan kadar gizi yang cukup. Wilayah mereka masih menyediakan pangan lokal seperti ubi, petatas, ikan dan udang di Paniai serta sayuran yang bisa dikonsumsi kapan saja. Tanpa sadar, hidangan di meja makan masih bisa dikategorikan bergizi. "Masalah orang Paniai saya lihat ada di soal higienitas," kata Fince Gobay.

Berbeda dengan dua wilayah itu, Kabupaten Asmat bisa dikatakan memang punya masalah kesehatan dan gizi yang perlu diperhatikan. Dari hasil *assessment* di wilayah itu, ditemukan bahwa ada pergeseran perilaku akibat pengaruh dari luar yang cukup mengancam warga asli Papua di sana. Salah satunya adalah kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman instan. Orang Asmat sudah mulai menganggap makanan instan itu sebagai makanan modern

yang lebih mentereng dari makanan lokal mereka. Bahkan, orang Asmat menjual kepingtina rawa tangkapan mereka dan menukarnya dengan mi instan dan sarden.

Di sisi lain, anak-anak balita juga terbiasa mengkonsumsi minuman energi dan kopi, alih-alih susu untuk anak balita. Kebiasaan ini tentu menjadi ancaman serius bagi perkembangan gizi mereka, apalagi mereka masih berada dalam tahap pertumbuhan.

Pergeseran kebiasaan akibat pengaruh dari luar ini menjadi catatan penting dari *assessment* yang dilakukan tim BaKTI di Kabupaten Asmat.

Potensi Besar Kolaborasi

Pemerintah Provinsi Papua bukannya tidak pernah melakukan upaya untuk memperbaiki kondisi kesehatan warganya. Beberapa program telah dicanangkan, bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dan mitra-mitra lainnya. Program ini telah berjalan lancar di beberapa daerah dan sudah menunjukkan hasil yang positif, meski di beberapa daerah tantangan tetap ada.

Salah satu program yang sedang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten adalah menjaga 1000 hari pertama kehidupan. Di tiga wilayah kabupaten lokasi *assessment*, program ini telah dijalankan. Ibu-ibu hamil dan anak di bawah usia tiga tahun mendapat perhatian khusus dengan pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan kesehatan.

Program ini juga dimodifikasi oleh beberapa pemerintah kabupaten, menyesuaikan dengan anggaran daerah mereka. Di Lanny Jaya misalnya, selain program 1.000 hari pertama kehidupan, pemerintah Lanny Jaya juga memberikan bantuan kepada ibu hamil sebesar 5 juta rupiah per ibu dengan syarat sang ibu memiliki dokumen pernikahan yang resmi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lanny Jaya juga sudah mempersiapkan Kartu Lanny Jaya Sehat yang dibagikan bulan Februari 2018 ini.

Di Paniai, pemerintah daerah juga menganggarkan bantuan persalinan kepada ibu yang melahirkan, selain pemberian makanan tambahan. Bantuan persalinan itu berupa stagen, makanan tambahan, susu dan uang tunai. Unit pelayanan kesehatan di Paniai seperti RSUD Paniai dan Puskesmas Enarotali

pun sangat giat dalam melakukan sosialisasi kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki anak balita.

Program-program kesehatan yang sudah berjalan ini dicatat sebagai potensi paling besar yang bisa dikolaborasikan dengan program BANGGA Papua.

Potensi lain yang juga menjadi catatan penting adalah besarnya pengaruh tokoh agama di tiga wilayah lokasi *assessment*. Di tiga wilayah tersebut, pemuka agama memegang peranan penting karena sangat didengar oleh warga. Wakil dari pemerintahan sendiri sering mengakui bahwa warga lebih mendengarkan pemuka agama daripada mereka.

Para pemuka agama tersebut selain berfungsi sebagai penyampai firman Tuhan, juga bisa menjadi tenaga pengajar dan memberi anjuran kesehatan. Fungsi inilah yang membuat mereka menjadi sangat dihormati dalam masyarakat. Selain itu, gereja juga menjadi sebuah tempat berkumpul yang sangat digemari. Selepas ibadah, warga biasanya menghabiskan waktu untuk bercengkerama dengan sesamanya. Dalam kegiatan ini, mereka bisa saja saling bertukar informasi atau saling bertukar pengetahuan.

Keberadaan pemuka agama dan kebiasaan berkumpul di gereja selepas ibadah tentunya menjadi potensi yang sangat besar untuk membantu sosialisasi program BANGGA Papua dan edukasi masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak.

Beragam potensi, kebiasaan, keunikan budaya, serta ancaman tersebut menjadi data dan fakta yang dikumpulkan oleh tim BaKTI. Keseluruhannya kemudian diramu untuk menciptakan strategi komunikasi dan alat komunikasi yang pas untuk mendukung berhasilnya program BANGGA Papua. Bagaimanapun, kemauan untuk mengenal secara mendalam tentu bisa menjadi pijakan yang pas sebelum memulai sebuah kegiatan. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang Program BANGGA Papua dapat menghubungi info@bakti.or.id



foto: Dokumentasi Burung Indonesia

Melestarikan Hutan Alam di Gorontalo dengan Restorasi Ekosistem

R

estorasi ekosistem adalah suatu upaya mengembalikan kondisi hutan dengan tujuan memperoleh kembali keanekaragaman hayati, struktur, dan lainnya di hutan produksi. Untuk

mengatur pola pengelolaan kawasan hutan produksi melalui restorasi ekosistem, Departemen Kehutanan telah menerbitkan Permenhut No: SK.159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem di kawasan Hutan Produksi yang kemudian dirubah dengan Permenhut Nomor: P.61/Menhut-II/2008.

Terobosan baru ini memungkinkan dilakukannya upaya restorasi hutan dalam kawasan hutan produksi. Pertama kali dalam sejarah kehutanan Indonesia, ada kebijakan

yang memungkinkan hutan produksi tidak ditebang dalam jangka waktu tertentu. Melalui restorasi ekosistem, hutan alam produksi diharapkan akan berfungsi kembali sebagai penyeimbang ekosistem, baik biotik maupun abiotik.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Permenhut No. 61/Menhut-II/2008, yang menyebutkan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk



mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

Salah satu hal yang menginspirasi Burung Indonesia melakukan upaya pelestarian ekosistem hutan alam produksi adalah sebuah studi di tahun 2000 yang menyatakan bahwa hutan dataran rendah Sumatera yang kaya akan keanekaragaman hayati akan segera habis jika tidak ada tindakan penyelamatan. Kondisi ini mendorong Burung Indonesia bersama kemitraan global BirdLife International melakukan inisiatif pemulihan hutan dataran rendah Sumatera di Jambi dan Sumatera Selatan yang kemudian dikenal dengan nama Hutan Harapan.

Inisiatif yang dimulai sejak tahun 2000 dan mendapatkan IUPHHK RE pada 2007 ini merupakan yang pertama di Indonesia. Atas inisiasi dan upaya ini tiga tokoh Burung Indonesia menerima penghargaan Kenton Miller Award pada IUCN World Park Congress 2014 di Sydney, Australia. Selain di Sumatera, Burung Indonesia juga melakukan upaya serupa di Provinsi Gorontalo sejak 2008.

Melestarikan Hutan Alam Gorontalo

Tak salah apabila penjelajah mahsyur Alfred Russel Wallace mengatakan Sulawesi memiliki “wajah” yang berbeda dibandingkan pulau-pulau besar lain di Indonesia. Saat menjelajahi Nusantara antara rentang 1856-1859, Wallace terpesona oleh keunikan hidupan liar di pulau ini yang bercirikan keragaman hayati benua Asia dan Australia yang tak ditemukan di pulau lain, termasuk keragaman hayati di Gorontalo. Kawasan hutan di Gorontalo merupakan rumah bagi beragam fauna endemis, seperti maleo senkawor (*Macrocephalon maleo*), monyet hitam gorontalo (*Macaca hecki*), babirusa (*Babirusa celebensis*), hingga tarsius sulawesi (*Tarsius tersier*).

Gorontalo terletak di jazirah bagian utara Sulawesi dan memiliki kawasan hutan yang luas; membentang dari Kabupaten Pohuwato hingga Kabupaten Boalemo yang saling terhubung dalam satu bentang alam. Sejak 2009, Burung Indonesia bersama para pihak—termasuk dengan Pemerintah Daerah

Gorontalo—berupaya mendorong model pengelolaan bentang alam yang berkelanjutan.

Model pengelolaan yang didorong oleh Burung Indonesia di Gorontalo ini berupaya memperkuat konektivitas kawasan hutan Popayato-Paguat, memulihkan hutan alam, serta mengembalikan dan meningkatkan fungsi ekologi dan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui pendekatan restorasi ekosistem. Kelestarian hutan Popayato-Paguat pun berperan penting untuk mencegah banjir dan longsor, serta mendukung ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim.

Sementara itu, melalui pendekatan restorasi ekosistem, hutan alam produksi dapat dikelola untuk memulihkan dan mengembangkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Pendekatan ini juga dapat menggabungkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Sebab, restorasi ekosistem tidak hanya berfungsi untuk melestarikan keragaman hayati yang terancam kepunahan, tetapi juga menyelamatkan tutupan hutan yang penting sebagai daerah tangkapan air yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di Gorontalo.

Meskipun terdapat bekas area tebangan di area hutan alam, Popayato-Paguat berada di antara dua kawasan hutan konservasi serta sembilan blok hutan lindung yang penting bagi keragaman hayati. Bahkan, BirdLife International telah menetapkan kawasan ini sebagai Daerah Penting bagi Burung dan Keragaman Hayati (*Important Bird and Biodiversity Area/IBA*) Indonesia yang ke-228.

Melihat pentingnya kawasan ini, hingga kini Burung Indonesia bersama mitra terus mendorong upaya restorasi ekosistem di kawasan Pohuwato dan Boalemo. Program ini bertujuan untuk memulihkan hutan alam sekaligus mengembalikan dan meningkatkan fungsi ekologi serta ekonominya. Melalui restorasi ekosistem, hutan alam produksi dapat dikelola untuk pemulihan ekosistem maupun pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan Restorasi Ekosistem di Gorontalo, hubungi info@burung.org

Kegiatan di BaKTI

6 Februari 2018

Kelas Berbagi : Diskusi Buku “Upaya Penambahan Nilai Pada Pohon-Pohon Milik Petani Hutan”

Kelas berbagi inspirasi kembali digelar oleh Perpustakaan BaKTI dengan menghadirkan para peneliti dari Balai Litbang LHK Kota Makassar untuk mendiskusikan buku “Upaya Penambahan Nilai Pada Pohon-pohon Milik Petani Hutan”. Buku ini adalah hasil kolaborasi para peneliti Australia dan Indonesia selama empat tahun meneliti tentang hutan komersial berbasis masyarakat di Indonesia.

Diskusi dibuka oleh Ibu Susan selaku Deputy Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI dan dimoderatori oleh Pak Bugi Sumirat, salah satu peneliti. Para narasumber yang terdiri Pak Achmad Rizal, Ibu Nur Hayati dan Ibu Nurhaedah berbagi pengalaman selama penelitian di hutan rakyat Kabupaten Bulukumba. Menariknya adalah para petani rupanya tidak mengetahui nilai dari pohon-pohon yang mereka tanam sendiri. Mereka bahkan tidak memiliki alasan mengapa menanam pohon-pohon tersebut. Maka dari itu mereka diberi edukasi tentang pentingnya merawat pohon-pohon agar log kayu yang dihasilkan memiliki nilai jual yang tinggi.



Kegiatan dihadiri 28 peserta dari berbagai latar belakang. Mereka antusias menanggapi maupun memberi pertanyaan seputar hutan komersial kepada para narasumber.

“Kerja keras untuk tata niaga kayu dan pendidikan masyarakat yang sangat mantap. Saya sangat mengapresiasi, semoga kegiatannya terus berlangsung dan mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait” ujar Ruknuddin Suleman, pengurus Kelompok Tani asal Kabupaten Pinrang. ●

9 Februari 2018

Diskusi Inspirasi BaKTI “Mallsampah - Layanan Pengelolaan Sampah Online”



Sebagai lembaga yang berfokus pada pertukaran pengetahuan, BaKTI kembali mengadakan Diskusi Inspirasi BaKTI dengan mengangkat topik Mallsampah – Layanan pengelolaan sampah online. Adi Saifullah Putra, CEO dan Founder Mallsampah hadir sebagai narasumber. Acara ini dipandu oleh Luna Vidya. Dalam diskusi ini Adi berbagi pengetahuan tentang apa itu Mallsampah. Mallsampah adalah layanan pengelolaan sampah online yang didirikan tahun 2015 dan menggunakan sistem bagi hasil. Ide Mallsampah berawal dari beberapa masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah yakni lingkungan yang kotor dan bau, pencemaran lingkungan dan banjir. Tidak hanya bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang

ingin membuang atau menjual sampahnya tanpa harus mengantar sendiri, Mallsampah ini mempunyai visi untuk meningkatkan proses daur ulang sampah yang hanya sekitar 10% di Indonesia menjadi 20-30% tiap tahunnya. Yang menjadi motor penggerak sehingga Mallsampah ini dapat hidup dan berjalan dengan baik adalah para Pengepul dan Pemulung yang saat ini berjumlah sekitar 100 orang. Diskusi Inspirasi BaKTI kali ini juga mempertemukan narasumber dengan peserta antara lain dari Badan Lingkungan Hidup daerah Polman, Bank Sampah dan juga komunitas pemulung di kota Makassar yang meminta Adi untuk hadir dan berbagi pengetahuan di tempat mereka.

Diskusi dihadiri oleh 53 orang peserta terdiri dari 27 orang Laki-laki dan 26 orang perempuan berasal dari NGO/CSO di Makassar, media, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas. ●



PENCARIAN PRAKTIK CERDAS 2018!



Yayasan BaKTI kembali mengajak individu, lembaga, kelompok masyarakat, pemerintah daerah, program mitra pembangunan, siapa saja untuk bergabung dalam pencarian Praktik Cerdas 2018 untuk dipresentasikan dalam **Festival Forum Kawasan Timur Indonesia VIII.**

Praktik Cerdas adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan berhasil menjawab tantangan pembangunan di sekitar kita.

Untuk bisa disebut Praktik Cerdas, BaKTI menggunakan 6 kriteria: **inovatif, berdampak nyata, partisipatif, berkelanjutan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan gender.**

Bila Anda sedang mengerjakan sebuah inisiatif yang berhasil menjawab tantangan pembangunan di daerah Anda, atau mengetahui kegiatan keren yang menginspirasi, nominasikan kegiatan tersebut sebagai **Praktik Cerdas 2018!**

Unduh formulir praktik cerdas di <http://bit.ly/praktikcerdasBaKTI> dan kirimkan via email ke info@bakti.or.id **paling lambat tanggal 30 April 2018.**

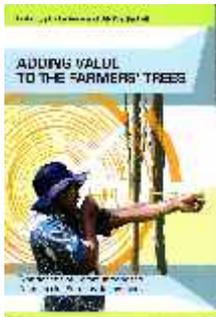
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai praktik cerdas silakan mengunjungi <http://praktikcerdas.bakti.or.id>



Mengarungi Samudera Pelayanan Publik : Sebuah Pedoman Penyusunan Konsep Desain Layanan

PENULIS UNPulse Lab Jakarta, UNDP, dan BaKTI

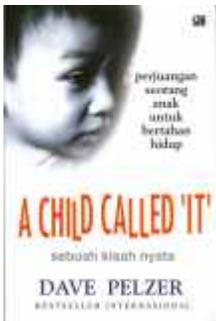
Pedoman ini berisi temuan dan pembelajaran dari sebuah prakarsa layanan publik bidang transportasi dimana UNDP berkolaborasi dengan Yayasan BaKTI dan Pulse Lab Jakarta dalam prosesnya. Pedoman ini dapat digunakan sebagai alat pandu sebelum memulai proses desain pelayanan publik, sebagai cara mengevaluasi pelayanan yang ada dan menentukan langkah selanjutnya, sebagai cara menilai bagaimana organisasi lain menyelenggarakan layanan dan tujuan lainnya.



Value To The Farmers' Trees

PENULIS Digby Race and Gib Wettenhall

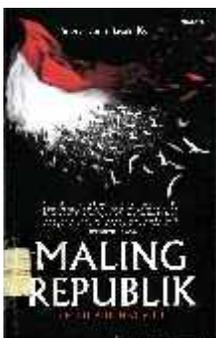
Hutan komersil berbasis komunitas (CBCF) terlihat di seluruh dunia sebagai suatu cara untuk membalikkan hilangnya hutan-hutan. Meskipun Indonesia telah banyak berinvestasi pada CBCF, meningkatkan pengetahuan para petani tentang nilai sebenarnya dari pohon mereka dan menghubungkan mereka kepada pasar yang layak terbukti jauh dari kata mudah. Buku ini berisi hal vital dan informasi yang mudah diakses oleh semua orang yang terlibat dalam perluasan hutan CBCF dan pembuat kebijakan, bukan hanya di Indonesia tetapi di semua negara berkembang.



A Child Called 'It'

PENULIS Dave Pelzer

Dewasa ini semakin sering kita mendengar peristiwa *child abuse* – penyalahgunaan anak. Film-film dan artikel-artikel di majalah-majalah yang mengupas persoalan ini semakin banyak beredar, namun kasus-kasus tersebut sering dipaparkan secara sensasional sehingga kita semakin tidak paham apa dan bagaimana sesungguhnya *child abuse* itu, apa yang sesungguhnya dialami dan diderita anak yang menjadi korbannya. Buku ini membuka wawasan kita, mencerahkan, dan mendidik. Penulis mengajak kita ikut mengalami rasa takut, rasa kekalahan, rasa kesendirian, rasa sakit, dan rasa marah anak korban kekerasan, sampai pada harapan terakhirnya.



Maling Republik

PENULIS Soenaryono Basuki Ks

Bersetting di tahun 1945-1949, novel ini sangat menarik bukan hanya sekedar untuk dibaca, namun juga mengenang masa-masa revolusi bangsa. Ber cerita tentang Budiman, yang alih-alih ikut berjuang membebaskan Republik dari jajahan Belanda, dia justru menjadi maling. Dia belajar ilmu maling dari kakeknya. Sampai suatu malam dia ditangkap basah oleh seorang koprak yang kemudian mengajaknya menjadi seorang pejuang. Bukan lagi maling barang orang, Budiman naik pangkat menjadi Maling Republik.